



## WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun 2012, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2012;  
b. bahwa untuk mendukung keberadaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a Konsideran ini, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012;
- c. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- e. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;

- g. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah seluruh Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

## Pasal 2

Ruang lingkup RKPD adalah merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun 2012 dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

#### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara RKPD tahun rencana dengan RPJMD dan RPJPD.

#### 1.4 Sistematika

Menguraikan susunan dokumen RKPD terkait pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

#### 1.5 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana dikaitkan dengan RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi.

### BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

#### 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

#### 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

#### 2.3 Permasalahan Pembangunan

### BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1 Arah kebijakan Ekonomi Daerah

#### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### BAB IV. TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

#### 4.2 Prioritas Pembangunan

### BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

### BAB VI PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN)

Pasal 3

- (1) Isi berserta rincian uraiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang memuat naskah RKPD;
- (2) Naskah RKPD yang memuat materi beserta uraian secara rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Probolinggo dengan mengedepankan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah;
- (2) Seluruh Kepala SKPD wajib memedomani dan memperhatikan serta melaksanakan RKPD.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Juli 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

**Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**AGUS HARTADI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660817 199203 1 016

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2012 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 Kota Probolinggo merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011, pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan penjabaran Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014.

Penyusunan RKPD Tahun 2012 dilakukan melalui pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratik dan politik dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah secara faktual utamanya yang berkembang di masyarakat. Untuk mewujudkan target capaian Visi Misi RPJMD Kota Probolinggo dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan propinsi dan nasional, RKPD Tahun 2012 telah pula mengakomodir dan memperhatikan hasil Musrenbang Kota Probolinggo Tahun 2012 dan Reses Anggota DPRD Kota Probolinggo 2011.

Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui berbagai tahapan :

1. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang kelurahan;
2. Musrenbang Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kedopak, dan Kecamatan Wonoasih;
3. Forum KISS dan Hasil Reses DPRD Kota Probolinggo Tahun 2011;
4. Musrenbang Kota Probolinggo.

Dalam setiap tahapan-tahapan proses di atas dilibatkan para pemangku kepentingan pembangunan daerah sesuai dengan keterkaitannya termasuk DPRD Kota Probolinggo.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan telah diubah untuk yang terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
22. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2012 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2010-2014, RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 serta memperhatikan RPJMD Propinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional.

### **1.4 Sistematika Dokumen RKPD**

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5 Maksud dan tujuan

#### Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan

#### Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

- 3.1 Arah kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan

#### Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

#### Bab VI Penutup (Kaidah Pelaksanaan)

## 1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2011 adalah sebagai pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);
- b. Penyusunan Kebijakan Umum (KU), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2012 adalah :

- Menjabarkan RPJMD 2010-2014 dan sinkronisasi dengan sasaran dan program RPJMN 2010-2014, RKP-Nasional Tahun 2012 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kota Probolinggo Tahun 2012 ;
- Menciptakan sinergi program kegiatan antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan ;
- Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya nasional dan daerah dalam rangka pembangunan daerah.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

**Kondisi Geografis**

Letak Kota Probolinggo berada pada 7° 43' 41" sampai dengan 7° 49' 04" Lintang Selatan dan 113° 10' sampai dengan 113° 15' Bujur Timur dengan luas wilayah 56,667 Km<sup>2</sup>. Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Secara administrasi Pemerintahan Kota Probolinggo terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kanigaran dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih dengan 6 Kelurahan dan Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan).

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu musim penghujan terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan Nopember sampai dengan Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus sampai bulan Oktober. Jumlah curah hujan pada tahun 2009 dari hasil pemantauan pada 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo, rata-rata tercatat sebesar 955 mm dan hari hujan sebanyak 64 hari. Apabila dibandingkan dengan rata-rata curah hujan tahun 2009 sebesar 932 mm dengan 75 hari hujan, maka kondisi tahun 2010 lebih basah dibandingkan tahun 2009.

Ada banyak terjadi fenomena perubahan iklim di tahun 2010, datangnya musim hujan tidak lagi memungkinkan diperkirakan dengan pengetahuan lokal. Curah hujan naik pada periode Nopember sampai bulan Maret. Kenaikan sampai dengan 50mm. Musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, pada tahun 2010 musim kemarau lebih panjang yang dimulai pada bulan April dengan intensitas curah hujan menurun sampai dengan September.

Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari sebesar 336 mm, sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari dengan 21 hari hujan. Musim kering yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan "Angin Gending" .

Secara umum, kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pengairan yang cukup, sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah untuk tanaman pangan maupun hortikultura, khususnya bawang merah yang merupakan komoditi unggulan. Akan tetapi ada beberapa dampak perubahan iklim yang terjadi di Kota Probolinggo dan perubahan pola hujan menyebabkan pergeseran dalam periode tanam, musim dan pola tanam, *degradasi* tanah dan penurunan ketersediaan air pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Sumber data yang disampaikan diatas hasil dari pemantauan dan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman (GIZ) Perubahan Iklim (PAKLIM) dan Pemerintah Kota Probolinggo.

Meskipun merupakan wilayah perkotaan, pola penggunaan tanah di Kota Probolinggo tahun 2010 ternyata masih terdapat lahan sawah seluas 1.866 hektar, lahan bukan sawah seluas 3.801 hektar. Lahan bukan sawah terbagi atas lahan kering 3.702,28 hektar dan lahan lainnya (tambak dan mangrove) seluas 98,72 hektar. Melihat potensi dan pemanfaatan wilayah demikian itu, banyak alternatif yang bisa dipilih untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan potensi daerah kota, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo melalui percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis investasi produktif dan berkesinambungan.

### **Gambaran Umum Demografis**

Jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik adalah sebesar 216.967 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 106.812 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 110.155 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan tingkat kepadatan penduduk Kota Probolinggo mencapai 3.829 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>.

Ditinjau dari penyebaran penduduk di wilayah Kota Probolinggo, Kecamatan Mayangan memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 6.980 jiwa setiap km<sup>2</sup>, disusul kemudian Kecamatan Kanigaran yaitu 5.121 jiwa setiap km<sup>2</sup>, Kecamatan Kademangan yakni 3.132 km<sup>2</sup>, Kecamatan Wonoasih 2.881 km<sup>2</sup> dan terendah Kecamatan Kedopok 2.233 jiwa setiap km<sup>2</sup>.

### **Potensi Unggulan Daerah**

#### **Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Secara klimatologis Kota Probolinggo merupakan dataran rendah dengan ketinggian daerah rata-rata + 4 M diatas permukaan laut. Hal ini mempengaruhi kondisi cuaca di Kota Probolinggo dengan karakteristik suhu maksimum 32oC dan suhu minimum 26oC. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Probolinggo antara lain : Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

#### **Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, kondisi tenaga kerja di Kota Probolinggo tahun 2010 meliputi Angkatan Kerja sebanyak 108.239 orang. Jumlah lowongan kerja sejumlah 3.561 buah dengan pencari kerja tahun 2010 yang terdaftar sebanyak 3.493 orang,

berhasil ditempatkan 2.228 orang, sehingga jumlah pencari kerja yang masih terdaftar hingga akhir tahun 2010 sebanyak 14.836 orang.

### Keamanan dan Ketertiban Umum

Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kota Probolinggo pada tahun 2010 relative kondusif dan terkendali. Hal ini terwujud karena masyarakat Kota Probolinggo memiliki karakteristik sosial budaya yang sangat kondusif bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban. Kentalnya nilai-nilai agama yang termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan masyarakat Kota Probolinggo untuk memiliki ketaatan hukum yang tinggi serta kesadaran akan hak asasi manusia.

### Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ditinjau dari segi pendapatan Kota Probolinggo, PDRB merupakan jumlah dari semua pendapatan yang timbul oleh karena ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi diwilayah Kota Probolinggo. Pada tahun 2006 PDRB (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) Kota Probolinggo sebesar Rp.1,603 triliun dan meningkat menjadi Rp. 1,706 triliun pada tahun 2007. Sedangkan PDRB tahun 2008 sebesar Rp. 1.808 triliun dan meningkat menjadi Rp. 1,905 triliun pada tahun 2009 serta menjadi Rp. 2,032 triliun (angka sementara) pada tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2006 mencapai 5,92% meningkat menjadi 6,39% pada tahun 2007. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo 6,02%, tahun 2009 menjadi 5,35 % dan tahun 2010 (angka sementara) menjadi 6,67.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

TABEL  
PDRB KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006-2010  
ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN 2000

	URAIAN	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010**
	<b><u>Atas Dasar Harga Berlaku</u></b>					
1	PDRB (Juta Rupiah)	2.871.893,63	3.272.352,52	3.792.923,65	4.189.614,49	4.469.061,78
2	PDRB perkapita (Rp.)	13.113.968,96	14.685.948,95	16.735.234,05	18.169.423,00	20.597.887,12
	<b><u>Atas Dasar Harga Konstan 2000</u></b>					
1	PDRB (Juta Rupiah)	1.603.445,99	1.705.841,87	1.808.452,67	1.905.226,66	2.032.305,28
2	PDRB perkapita (Rp.)	7.321.838,34	7.655.625,89	7.979.300,79	8.262.543,00	9.336.886,86
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,92	6,39	6,02	5,35	6,67
	Jml penduduk	<b>207.953</b>	<b>210.446</b>	<b>216.833</b>	<b>217.501</b>	<b>216.967</b>

Keterangan :

\*\* Angka sementara tahun 2010

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 merupakan evaluasi pencapaian hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di Kota Probolinggo selama tahun 2010. Evaluasi pelaksanaan pembangunan

Tahun 2010 merupakan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2010 dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dari evaluasi ini dapat diketahui program-program yang telah mencapai sasaran, program yang belum maksimal pencapaiannya, ataupun program yang tidak tercapai, sehingga dapat dijadikan dasar kajian dan langkah tindak bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo untuk tahun berikutnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010 dapat ditunjukkan pencapaian indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo tahun 2010-2014. Adapun pencapaian kinerja masing-masing misi RPJMD Kota Probolinggo dapat disajikan sebagai berikut :

- 1) Misi 1 yaitu “Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia”;

Kemajuan yang dicapai dari pelaksanaan misi 1 ini tercermin dari kondisi keagamaan yang relatif rukun dan damai diantara pemeluk agama dan penganut kepercayaan. Kehidupan beragama di Kota Probolinggo berkembang dengan baik, dengan mayoritas penduduk beragama Islam mencapai 95 % dapat hidup rukun dan damai. Hal ini menunjukkan tingginya rasa saling hormat menghormati diantara pemeluk agama.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat ditandai oleh hasil capaian indikator-indikator pendidikan tahun 2010 yang cukup signifikan. Indikator-Indikator pendidikan dimaksud dapat saya sampaikan sebagai berikut.

Pertama, Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Untuk jenjang SD/MI tercapai sebesar 101,83 %, Tingkat SMP/MTs sebesar 90,76 %, SM/MA sebesar 85,55 %. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI sebesar 101,83 %, SMP/MTs terealisasi sebesar 90,76 %, dan SMA/MA terealisasi sebesar 85,55 %. Kedua, Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Untuk SD/MI Tahun 2010 sebesar 114,98 %, SMP/MTs sebesar 116,10 %, dan SMA/MA sebesar 119,31 %. Ketiga, Angka Transisi yaitu persentase siswa yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk jenjang SD/MI sebesar 130,20 %, SMP/MTs sebesar 115,60 %, SM/Ma sebesar 115,32 %. Keempat, Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,16 %, SMP/MTs sebesar 0,77 % dan SM/MA sebesar 1,78 %.

Keempat indikator pendidikan tersebut diatas merupakan ukuran keberhasilan pendidikan di Kota Probolinggo yang dapat dicapai selama tahun 2010. Mengingat pendidikan adalah merupakan gerbang ilmu pengetahuan, maka diperlukan konsistensi dalam usaha mencerdaskan masyarakat Kota Probolinggo sehingga kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, tingkat rasio guru dan murid terus dikembangkan, selaras dengan kurikulum

yang tepat, manajemen kependidikan yang mantap, yang mampu merangsang kemandirian, kreativitas, inovasi dibarengi dengan akhlak yang mulia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berbagai program dan kegiatan kesehatan telah dilaksanakan selama tahun 2010. Dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah banyak kemajuan yang diperoleh, namun disisi lain masih menyisakan beberapa permasalahan karena belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan terutama pada masalah gizi buruk pada balita, jumlah kematian ibu, jumlah kematian bayi, dan peningkatan jumlah kasus penyakit hal tersebut terjadi karena :

1. Upaya penanganan kasus gizi buruk sudah dapat tertangani 100%, tetapi kasus gizi buruk masih ada dan jumlah cukup banyak yaitu 381 balita di tahun 2010, jumlah kasus ini menurun dibandingkan tahun 2009 sebanyak 410 balita. Penyebab terjadinya kasus gizi buruk di Kota Probolinggo antara lain kemiskinan, pola asuh yang salah, tingkat pengetahuan orang tua yang kurang dan penyakit bawaan;
2. Jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2010 ini meningkat menjadi 6 (enam) orang dibandingkan tahun 2009 yaitu sebanyak 4 orang, hal ini disebabkan karena jumlah kasus ibu hamil resiko tinggi dengan komplikasi masih cukup banyak dan belum tertangani 100% karena bumil tidak memeriksakan kehamilannya secara paripurna, masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun, ibu nifas tidak memeriksakan diri dengan segera, pengetahuan ibu yang kurang tentang kehamilan dan resikonya. Dan penyebab kematian ibu hamil tahun 2010 ini antara lain karena perdarahan, penyakit jantung dan TB-Paru;
3. Jumlah kematian bayi pada tahun 2010 ini meningkat yaitu sebanyak 69 anak dibandingkan tahun 2009 sebanyak 43 anak. Kematian bayi ini antara lain disebabkan karena bayi dengan berat badan lahir rendah, asfexia, infeksi dan kelainan bawaan;
4. Peningkatan jumlah kasus suatu penyakit, masih menjadi ancaman bagi masalah kesehatan setiap tahunnya terutama penyakit demam berdarah (DBD). Meskipun jumlah kasus yang ada tertangani 100% tetapi potensi jumlah kasus DBD dari tahun ke tahun selalu meningkat, di tahun 2010 kasus DBD meningkat yaitu sebanyak 841 kasus, dibandingkan tahun 2009 sebanyak 429 kasus;
5. Koordinasi dan sinkronisasi lintas program belum optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu kegiatan maupun dalam proses penganggaran;
6. Database yang masih lemah. Upaya penanganan, meningkatkan kinerja petugas dengan cara melakukan verifikasi dan akurasi data di lapangan, memberikan pelatihan ketrampilan petugas dalam mengumpulkan dan mengolah data, meningkatkan sarana dan prasarana SIK (Sistem Informasi Kesehatan) yang memadai, memperbaiki system pengumpulan data yang ada untuk lebih sistematis dan mudah untuk dioperasikan.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka solusi yang sudah dilaksanakan adalah :

1. Untuk mengurangi jumlah kasus atau prevalensi gizi buruk dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan telah dilakukan penanganan yang sifatnya pencegahan dengan memberikan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pada

- semua balita, pemantauan status gizi balita, pelacakan kasus gizi buruk dan memberikan penyuluhan tentang gizi yang baik dan seimbang kepada ibu balita sehingga dapat menurunkan prevalensi gizi buruk pada balita, karena kasus gizi buruk yang ada kebanyakan adalah kasus lama yang berulang menjadi status gizi buruk kembali setelah tidak mendapatkan bantuan intervensi dari pemerintah;
2. Untuk mengurangi jumlah kasus kematian ibu melahirkan telah dilakukan peningkatan kemitraan bidan dan dukun, pembentukan kelas ibu hamil di semua kelurahan, meningkatkan program P4K dengan stiker, mengaktifkan peran kader dalam penemuan bumil secara dini, memperbanyak sumber data untuk pengumpulan data tentang komplikasi kebidanan dan melakukan penyuluhan secara terus menerus dan berkesinambungan;
  3. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus kematian bayi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dengan memberikan penyuluhan tentang perawatan kehamilan, perawatan neonatal, ASI eksklusif, dan tentang imunisasi;
  4. Perlu evaluasi dan tindak lanjut yang lebih tepat untuk penanganan pelaksanaan kegiatan dengan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk mencapai hasil yang maksimal, yaitu melaksanakan upaya pencegahan dengan melaksanakan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M (Menguras, Menutup, Mengubur), meningkatkan peran serta kader kesehatan di desa / posyandu serta kader jumantik, membagikan abate, memberikan penyuluhan tentang penyakit DBD kepada masyarakat, diberbagai tempat antara lain di posyandu, di sekolah, pengajian RT/RW, disertai dengan memasang banner, poster dan membagikan leaflet;
  5. Upaya penanganan dengan diadakannya pertemuan secara berkala setiap tiga bulan sekali yang diikuti oleh kepala bidang, kepala seksi dan pengelola program dengan tujuan untuk mengadakan evaluasi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi semua masalah yang ada, serta mencari pemecahan masalah dan tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang;
  6. Upaya penanganan koordinasi dan sinkronisasi lintas program dengan diadakannya pertemuan secara berkala setiap tiga bulan sekali yang diikuti oleh kepala bidang, kepala seksi dan pengelola program dengan tujuan untuk mengadakan evaluasi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi semua masalah yang ada, serta mencari pemecahan masalah dan tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga merupakan merupakan salah satu sasaran pembangunan Kota Probolinggo. Progran dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2010 adalah indentifikasi pemuda unggulan bermanfaat untuk menciptakan pemuda kreatif sebagai pelopor pembangunan, pembinaan cabang olahraga daerah, pembangunan sarana dan prasarana olahraga, gudang olahraga dan alat kebersihan stadion, mes baru stadion, rehab tenis indoor, pagar lapangan angguran dan rehab

kolam renang, pemeliharaan ringan sarana dan prasarana olahraga di stadion, tenis indoor, dan kolam renang.

Dari data yang berhasil dihimpun maka dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat meningkatkan jumlah organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan terealisasi sebesar 85 persen dari target 90 persen, meningkatkan peran dan prestasi generasi muda terealisasi sebesar 70 persen dari target sebesar 90 persen . Dalam bidang keolahragaan, prestasi yang dapat dicapai sebesar 75 persen dari target sebesar 90 persen.

Untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan penduduk miskin di tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan. Diantaranya adalah program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dan Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan sasaran pertama yang akan diwujudkan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan , pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Indikator keberhasilan dari sasaran ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Disamping itu juga terus meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam ikut mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengaduan dan laporan masyarakat tentang Kota Probolinggo, baik pengaduan lewat Radio Suara Kota maupun pengaduan melalui Sisten Perencanaan Pembangunan Kota Kita (SP2K2) yang saat ini dikelola Bappeda. Hasil sementara pengaduan masyarakat yang berhasil dihimpun mulai bulan April sampai dengan Desember 2010 sebanyak 182 pengaduan.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik ditandai tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Gubernur dengan target 85 % terealisasi sebesar 80 %, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Walikota dengan target 90 % terealisasi sebesar 90 %, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif dari target 80 % dapat terealisasi sebesar 80 %, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden dengan target 85 % dapat terealisasi sebesar 80 %. Dengan pencapaian rata-rata diatas 80 % dapat dikatakan bahwa sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik di Kota Probolinggo terakomodasi dengan baik.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Untuk mewujudkan sasaran ini beberapa kegiatan telah dilakukan selama tahun 2010, diantaranya adalah Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata, Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah, dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini ditandai dengan tercapainya target indikator kinerja jumlah kelompok

pelestarian budaya lokal yang aktif sebesar 93,73 persen dan tingkat pengembangan budaya lokal sebesar 88,89 persen.

Sasaran keempat yaitu meningkatnya peran serta kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan, dengan dua indikator sasaran. Pertama jumlah lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan target yang ditetapkan sebesar 80 persen, pada tahun 2010 tercapai 60 persen atau sebesar 75 persen. Kedua Ratio swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan jumlah stimulan dari pemerintah dengan target sebesar 80 persen terealisasi sebesar 70 persen.

- 2) Misi II yaitu : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;

Apabila ditinjau dari pendapatan per kapita, penduduk Kota Probolinggo cukup memberikan dukungan bagi kemajuan pembangunan daerah, namun masalah kemiskinan tetap menjadi perhatian utama, dan merupakan faktor penghambat yang perlu mendapatkan penanganan. Meskipun telah diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial, namun masih terdapat penderita masalah kesejahteraan sosial, maka hal ini jelas memerlukan langkah penanganan yang konstruktif dan komprehensif dimasa mendatang. Disamping ketersediaan sumber daya manusia yang potensial, ketersediaan sarana dan prasarana fisik juga mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sarana dan prasarana itu diperlukan untuk membantu kelancaran proses produksi dan distribusi produk. Selain itu pemenuhan sarana dan prasarana juga merupakan bentuk pelayanan pemerintah daerah terhadap perkembangan dan kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.

Perkembangan perekonomian Kota Probolinggo mencatat kemajuan penting. Dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB tahun 2008 sebesar satu triliun delapan ratus delapan milyar rupiah (Rp. 1,808 triliun), tahun 2009 sebesar satu trilyun sembilan ratus lima milyar rupiah (Rp.1.905 triliun) dan pada tahun 2010 (angka sementara) meningkat menjadi dua triliun tiga puluh dua milyar rupiah (Rp.2.032 triliun). Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tahun 2008 sebesar 6,02 persen, tahun 2009 turun menjadi 5,35 persen dan tahun 2010 (angka sementara) meningkat menjadi 6,06 %. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan hasil kontribusi dari pesatnya kegiatan perdagangan, pengangkutan dan pembangunan industri yang membawa implikasi peningkatan penggunaan sumber daya alam serta sarana prasarana.

Secara makro dapat disebutkan bahwa perekonomian Kota Probolinggo pada tahun 2010 mengalami perkembangan/ pertumbuhan cukup berarti apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2009. Dominasi peranan ekonomi sektoral di Kota Probolinggo Tahun 2010 (Atas Dasar Harga Konstan), secara berturut-turut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 42,73 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 18,33 % dan sektor industri pengolahan sebesar 14,48 %. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor tersier secara signifikan masih mendominasi kontribusi dalam struktur ekonomi Kota Probolinggo, karena sifat sektor ini yang sangat terbuka dalam menampung angkatan kerja baru yang baru memasuki dunia kerja yang tidak

terserap di sektor sekunder dan primer. Peranan sektor primer dan sekunder dalam tiga tahun terakhir menunjukkan mulai adanya penurunan.

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya daerah secara lestari dan berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kota Probolinggo, berbagai program telah dilaksanakan. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan sembilan kegiatan yang terkait dengan kebersihan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Program Peningkatan Pengendalian Polusi dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Target kinerja berupa indeks standar pencemaran udara dengan kategori baik sebesar 80 % tercapai sebesar 95 % atau 118,75 persen, penurunan kasus pencemaran lingkungan dengan target sebesar 80 % dapat tercapai sebesar 100 %. Perolehan angka ini menunjukkan bahwa Kota Probolinggo telah berhasil dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Semua ini berkat kerja keras semua pihak dan utamanya masyarakat Kota Probolinggo.

- 3) Misi III yaitu : mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima;

Program-program operasional yang mendukung misi 3 ini telah dilaksanakan, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik, Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah, Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Disamping program-program tersebut dengan kelembagaan yang sudah memiliki sertifikat ISO dengan 26 jenis pelayanan mampu menciptakan iklim investasi yang prospektif dan kondusif di Kota Probolinggo. Disamping berbagai pelayanan dan kemudahan yang diberikan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menciptakan iklim investasi yang prospektif dan kondusif tersebut diatas, penyediaan tenaga kerja yang berkualitas juga dilakukan. Melalui dinas Tenaga Kerja berbagai upaya penyediaan tenaga kerja dilaksanakan, diantaranya melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Jejaring Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan, Program Pengawasan Dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Program Pengembangan Hubungan Industrial.

Dukungan lain untuk mewujudkan misi 3 diatas adalah dengan penyediaan sarana prasarana kota yang memadai berupa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Pengawasan Jasa Konstruksi, Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Lingkungan, Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan, Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan, Program Pengawasan Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Dari program-program yang telah dilaksanakan tersebut maka kondisi sarana dan prasarana Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2010 adalah prasarana jalan dalam kondisi mantap mencapai 90 persen, tingkat kelancaran dan ketertiban arus transportasi kota mencapai 90 persen dan jumlah penyediaan air bersih semakin meningkat.

Guna menciptakan pelayanan publik yang prima Pemerintah Kota Probolinggo dari tahun ke tahun terus meningkatkan kualitas pelayanan baik dalam bidang pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal perijinan senantiasa memberikan kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaiannya.

- 4) Misi IV yaitu : menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum yang disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam rangka penegakan hukum terutama yang terkait dengan peningkatan disiplin pegawai, Pemerintah Kota Probolinggo disamping memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Pemberian sanksi ini dimaksudkan oleh memberikan efek jera terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Selama tahun 2010 Pemerintah Kota Probolinggo telah memberikan sanksi kepada karyawan dan karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin. Tegoran lisan sebanyak 6 orang, tegoran tertulis sebanyak 6 orang, pernyataan tidak puas sebanyak 7 orang, penundaan gaji berkala sebanyak 2 orang, penundaan kenaikan pangkat sebanyak 2 orang, penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama 1 tahun sebanyak 5 orang, pembebasan jabatan sebanyak 3 orang dan pemberhentian tidak dengan hormat sebanyak 5 orang.

Dalam rangka pengendalian manajemen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka telah dilaksanakan pemeriksaan rutin Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) terhadap 39 unit kerja, selesai 36 unit kerja, sisa 3 unit kerja karena sudah pemeriksaan dari BPK. Sedangkan pengaduan masyarakat sebanyak 49 kasus selesai ditindaklanjuti 46 kasus, sisa 3 dalam proses.

### **2.3 Permasalahan Pembangunan**

Masalah sosial merupakan hasil dari proses perkembangan masyarakat dalam penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang menimbulkan problema sosial, yaitu ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam masyarakat yang dapat mengganggu tertib sosial. Problema sosial masyarakat perkotaan di Kota Probolinggo sangat dimensional, namun yang menonjol dan memerlukan perhatian adalah :

Permasalahan Sosial

- a. Masalah dampak urbanisasi yang belum sepenuhnya terkendali;

Urbanisasi yang cenderung untuk terus berlangsung menyebabkan ketidak seimbangan tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia pada sektor perkotaan, dan ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung fasilitas perkotaan.

Implikasinya adalah terjadinya kecenderungan meningkatnya jumlah pengangguran, semakin meluasnya permukiman kumuh dan padat, kesenjangan antar penduduk kota, sektor informal yang tidak terkendali dan meningkatnya ancaman gangguan tramtibmas.

- b. Kesenjangan dan konflik sosial yang masih belum teratasi;

Kesenjangan adalah masalah kota yang cukup menonjol, baik kesenjangan antar golongan penduduk yang tampak dari distribusi pendapatan maupun kesenjangan antar sektor ekonomi yang tampak dari kesenjangan produktivitas, akses terhadap pasar, akses terhadap modal dan manajemen. Kesenjangan yang sempat meluas pada pasca krisis ekonomi akan memicu kesenjangan sosial, hingga saat ini masih belum sepenuhnya dapat diatasi.

- c. Pengguna Narkoba dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum sepenuhnya teratasi;

Kasus penyalahgunaan narkoba telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat dan bahkan dunia pendidikan. Seperti fenomena gunung es, kasus yang tampak hanya kecil (hanya sekitar kurang dari 10 persen dari mereka yang menyalahgunakan narkoba mencari pengobatan ke rumah sakit), tetapi ternyata permasalahan yang dihadapi cukup luas dan kompleks. Penyalahgunaan narkoba yang semakin marak telah menimbulkan banyak korban dan mengancam masa depan bangsa. Permasalahan yang dihadapi masyarakat perkotaan dapat dikatakan lebih serius, karena akses terhadap sumber permasalahan juga lebih luas dan kompleks.

Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang antara lain nampak dari meningkatnya jumlah gelandangan, pengemis, pengamen dan peminta-minta di perempatan jalan, disamping memperburuk wajah kota, pada kesempatan tertentu tidak mustahil membuka ruang timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan dan kekhawatiran warga kota.

- d. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal.

Kesenjangan distribusi pendapatan berimplikasi pada aksesibilitas warga kota untuk memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tingkat pendidikan yang rendah dan derajat kesehatan yang buruk dari sebagian warga kota tercermin dari kualitas kehidupan masyarakat dan wajah fisik kota, dan juga berkorelasi positif dengan masalah-masalah sosial kota.

### **Permasalahan Ekonomi**

Meskipun Pemerintah Kota Probolinggo telah berupaya melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak krisis ekonomi, namun hasilnya belum cukup optimal. Kesenjangan ekonomi baik antar pelaku ekonomi maupun antar golongan pendapatan masih cukup terasa dan terjadi pada segala aspek kehidupan, sehingga struktur dan fundamental ekonomi sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi.

- a. Masalah pemulihan perekonomian daerah yang belum optimal;

Upaya pemulihan ekonomi sempat mengalami tantangan baru di luar faktor ekonomi seperti terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan imbas terjadinya perseteruan elit politik yang kesemuanya kurang memberi iklim kondusif bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi. Dampak dari kondisi

lambatnya pemulihan ekonomi daerah adalah menurunnya tingkat investasi sektor swasta. Disamping itu, kebijakan nasional yang berubah - ubah juga menyebabkan iklim tidak kondusif untuk upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah, sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan perekonomian daerah sehingga tidak mampu meningkatkan lapangan kerja secara berarti.

b. Masalah pedagang kaki lima yang belum sepenuhnya terkendali;

Krisis ekonomi dan urbanisasi menyebabkan banyaknya penduduk kota bekerja pada sektor informal, terutama pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang meningkat cukup pesat dan keterbatasan daya tampung ruang yang tersedia di pasar atau tempat-tempat yang telah disediakan, menyebabkan pedagang kaki lima mengambil tempat di emperan toko, di trotoar, badan jalan atau di berbagai fasilitas umum lainnya. Keberadaan mereka di tempat-tempat yang tidak semestinya telah mengganggu kepentingan dan ketertiban umum dan seringkali menimbulkan masalah-masalah sosial baru, seperti gangguan terhadap lalu lintas, sampah yang tidak terkendali, perlawanan terhadap upaya penertiban dan meningkatnya kriminalitas.

c. Masalah partisipasi UKM yang belum optimal;

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat antar pelaku ekonomi menuntut kemampuan untuk memiliki daya saing yang berkelanjutan. Kemampuan usaha kecil dan menengah di perkotaan dalam memperebutkan pasar yang semakin kompetitif sangat terbatas. Pengelolaan usaha belum efektif sehingga tidak mampu bersaing dengan kompetitor besar, apalagi kompetitor asing. Keterbatasan akses pasar, keterbatasan pada akses sumber-sumber permodalan dan keterbatasan manajemen menjadi hambatan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah perkotaan.

d. Masalah pengangguran dan kemiskinan.

Laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan cukup tingginya angka pengangguran di Kota Probolinggo. Daya serap lingkungan kerja yang belum membaik akibat krisis ekonomi, meningkatnya pendatang baru yang mencari pekerjaan di Kota Probolinggo, jelas semakin membebani Kota Probolinggo dalam penanggulangan masalah tenaga kerja sektor perkotaan.

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada jumlah penduduk miskin yang jumlahnya ternyata masih cukup besar. Inflasi yang cukup tinggi, nilai tukar rupiah yang relatif lemah dan jumlah pengangguran yang meningkat akibat sulitnya lapangan kerja di sektor perkotaan, makin memperburuk peta kemiskinan penduduk kota dengan berbagai implikasinya.

### **Permasalahan Sarana dan Prasarana Kota**

Keterbatasan sarana dan prasarana kota telah menjadi persoalan klasik. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat perlu diikuti dengan serangkaian program investasi perkotaan dalam bentuk memperluas pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan di seluruh wilayah kota. Problema penyediaan sarana dan prasarana kota sesuai tuntutan di atas, biasanya terletak pada keterbatasan dana yang cukup untuk membangun dan memelihara prasarana kota, keterbatasan pemerintah kota dalam penyesuaian prosedur dan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana kota dan

penerapan metode pengembalian biaya (cost recovery) yang belum efektif dan konsisten serta belum efektifnya penegakan hukum menyangkut pengaturan kota.

a. Ruang terbuka hijau dan keindahan kota yang belum optimal;

Peningkatan kualitas lingkungan terkait dengan tersedianya ruang terbuka hijau yang seimbang dengan kebutuhan fungsi ekologis untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan. Realitas yang ada menunjukkan ruang terbuka hijau semakin menyempit karena perubahan fungsi untuk kebutuhan prasarana kota dan penggunaan tanah secara liar serta penyerobotan tanah yang sebenarnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kota. Sementara itu, pengadaan ruang terbuka hijau di kawasan baru belum optimal karena mahalnya harga tanah dan sulitnya pembebasan tanah.

Intensitas kegiatan yang tinggi dan penggunaan fungsi lahan yang menyimpang, juga menimbulkan masalah-masalah keserasian dan keindahan lingkungan kota yang semakin meningkat. Keberadaan taman-taman kota dan hutan kota masih belum dapat diwujudkan dengan optimal, baik pengembangan maupun pemeliharannya.

b. Kualitas lingkungan yang belum memadai;

Lingkungan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan. Untuk itu upaya menciptakan suasana kota yang bersih, terbebas dari segala polusi dan penumpukan sampah perlu dilakukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kualitas lingkungan yang semakin baik dan sehat. Memang kegiatan yang tinggi menimbulkan masalah-masalah lingkungan yang semakin meningkat. Pencemaran udara berlangsung dengan intensitas tinggi yang berasal dari sumber bergerak (transportasi), sumber tidak bergerak (proses industri dan rumah tangga) dan sumber dari pembuangan/pembakaran limbah padat. Pencemaran air juga terjadi dalam skala luas, bersumber pada limbah cair kegiatan usaha dan rumah tangga.

c. Penataan ruang yang belum efektif memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat;

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk memberi arah bagi pembangunan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu penataan ruang juga bertujuan untuk memanfaatkan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masalah substansial dan operasional dalam penataan ruang selain karena tata ruang masih bersifat abstrak interpretatif, adalah juga karena adanya kecenderungan egoisme sektoral, sehingga penataan ruang yang dilakukan bersifat birokratis. Pada sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan perorangan dan kolektif yang bertentangan dengan tata ruang, kemiskinan kota dan tekanan penambahan penduduk telah menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan, yang membawa implikasi pada tidak terintegrasinya tata ruang wilayah dengan pemanfaatan ruang.

d. Lalu lintas dan transportasi umum yang belum memadai;

Mobilitas yang tinggi adalah ciri dari sebuah kota yang dinamis. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan panjang dan ruas jalan berakibat meningkatnya kepadatan lalu lintas yang bisa menimbulkan kemacetan. Apalagi melalui kota Probolinggo, terbentang jalur jalan lintas selatan, baik menuju kota-kota di Propinsi Jawa Timur bagian Timur maupun menuju ke Propinsi Bali. Banyaknya jumlah kendaraan di jalan bila tidak diantisipasi dapat menimbulkan penambahan titik -

titik rawan kemacetan. Penambahan kendaraan di jalan dipacu oleh kondisi angkutan umum yang kurang nyaman dan tidak tertib, sehingga menjadikan penggunaan kendaraan pribadi menjadi pilihan warga kota. Kondisi ketidakteraturan lalu lintas di jalan diperparah dengan meningkatnya jumlah becak dan tingkat kedisiplinan pengemudinya yang sangat rendah.

- e. Pengelolaan sampah dan air limbah yang belum sepenuhnya tertangani dengan baik; Masalah sampah yang menonjol di Kota Probolinggo tampak pada pewadahan dan pengumpulan, terutama pada wilayah sekitar pasar, tempat-tempat umum dan permukiman padat penduduk dan kumuh, yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem, sehingga pengangkutan sampah belum optimal. Pembangunan sistem peralihan antara yang belum sepenuhnya terealisasi, kualitas dan jumlah armada pengangkutan sampah dan air limbah yang terbatas, menyebabkan sistem pengangkutan sampah sampai ke TPA belum optimal. Begitu pula pengelolaan air limbah belum ditangani dengan baik.
- f. Jangkauan fasilitas air bersih yang masih terbatas; Pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan merupakan salah satu jasa pelayanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kota. Pada aspek ini pelayanan di Kota Probolinggo belum optimal, yang tampak dari belum optimalnya jaringan pelayanan ke seluruh wilayah dan penjuru kota, cakupan pelayanan yang belum cukup luas dan produksi yang belum optimal. Dengan kondisi demikian maka penggunaan air tanah masih cukup luas. Penambahan produksi dan perluasan jaringan layanan memerlukan biaya yang cukup besar. Penurunan kualitas dan kuantitas karena aktivitas penduduk di sektor *catchment* menyebabkan menurunnya kualitas air dan kelangsungan produksi air minum.
- g. Sistem drainase kota yang belum sepenuhnya baik; Berkembangnya hunian penduduk ke arah lahan basah atau daerah parkir air menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menjadi berkurang. Kecenderungan terjadinya penyempitan alur sungai daerah hilir yang diperparah dengan sedimentasi sungai pada daerah yang relatif datar, serta hujan lokal dengan intensitas tinggi pada saat laut pasang, adalah merupakan faktor-faktor determinan terjadinya genangan air lokal atau banjir kota yang sulit dihindarkan. Berkembangnya permukiman penduduk di sepanjang bantaran sungai telah menyebabkan terjadinya penyempitan alur sungai dan tidak optimalnya fungsi sungai sebagai pencegah banjir.
- h. Perumahan dan penanganan daerah kumuh yang belum optimal; Besarnya jumlah penduduk yang bermukim pada lahan terbatas menjadi akar masalah perumahan. Kondisi ekonomi yang lemah dari sebagian warga kota menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk memiliki lahan dan perumahan yang layak. Penataan dan penyehatan lingkungan permukiman kota mendesak untuk dilaksanakan. Sementara itu upaya penertiban tampak belum dapat berjalan lancar karena sikap resistensi dari masyarakat dan isu HAM. Penertiban juga seringkali terlambat setelah persoalannya bertambah besar.
- i. Areal interaksi publik yang masih terbatas.

Jumlah penduduk kota yang bertambah padat mengakibatkan semakin meningkatnya permintaan akan areal interaksi publik yang berguna sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Karenanya pada kawasan-kawasan terbangun kota, perlu penyediaan sarana interaksi publik tersebut, sehingga tidak timbul kesulitan pada waktu mendatang.

### **Permasalahan Manajemen Pemerintahan**

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu menjamin ketentraman dan ketertiban, menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Problema dalam mengoptimalkan efektivitas pemerintahan adalah akseptabilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah cenderung menurun setelah masa reformasi. Lemahnya legitimasi menyebabkan kurang efektifnya pemerintah sebagai institusi pengatur yang berwibawa. Permasalahan inti yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintahan adalah :

- a. Partisipasi masyarakat dan peran aktif kelembagaan masyarakat yang belum optimal;  
Implikasi dari krisis multidimensi yang terjadi pasca pemerintahan Orde Baru termasuk krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Karenanya diperlukan upaya untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah guna mendorong peningkatan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan.  
Kurang optimalnya lembaga-lembaga kemasyarakatan menjalankan peranan dalam memelihara keselarasan sosial, menjaga moralitas dan harmoni sosial, dikhawatirkan akan menurunkan daya tangkal terhadap berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban sosial di perkotaan. Karenanya diperlukan upaya untuk mendorong agar lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat menjalankan peranannya secara bertanggungjawab.
- b. Peraturan perundang-undangan daerah yang belum memadai;  
Kurang efektifnya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan penegakan hukum, disamping upaya yang dilakukan selalu direspon dengan perlawanan oleh warga kota, juga sebenarnya disebabkan peraturan perundangan yang ada belum optimal, dan sebagian lagi sudah tidak relevan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat pada saat sekarang, dan karenanya memerlukan peninjauan dan evaluasi secara menyeluruh. Pengalaman masa lampau dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut merumuskan kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah yang ternyata membuahkan berbagai resistensi masyarakat, tentu menjadi pelajaran berharga bagi upaya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan.
- c. Spirit dan etos kerja aparat yang perlu ditingkatkan;  
Peningkatan kualitas aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang mutlak dalam suatu pemerintahan yang baik. Kondisi ini dapat tercapai apabila aparat pemerintah daerah memiliki kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya, serta memiliki spirit dan etos kerja yang baik.
- d. Kinerja pelayanan yang belum optimal.

Pelayanan masyarakat sebagai fungsi utama pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya terlaksana berdasarkan prinsip - prinsip pelayanan yang baik dan prima. Ketepatan standar pelayanan atas prosedur dan produk pelayanan, mata rantai pelayanan yang masih belum efisien, rendahnya tingkat *complain management*, kurang optimalnya aktivitas *quality control* dan *quality assurance*, masih terasanya budaya kekuasaan dan bukan budaya pelayanan, kurang diterapkannya prinsip *equity*, *equality*, dan *fairness* dalam pemberian pelayanan, adalah merupakan beberapa masalah yang dihadapi oleh kinerja pelayanan publik warga kota.

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN**  
**KEUANGAN DAERAH**

**3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan RPJMD , tahun 2012 merupakan tahap Ekonomi berkesinambungan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kota Probolinggo, dengan memperhatikan kondisi ekonomi regionla dan nasional, maka arah pembangunan perekonomian Kota Probolinggo dapat diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor industri pengolahan. Juga kepada sektor yang memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang serta tahan terhadap guncangan ekonomi yaitu sektor pertanian.Sedangkan sektor lainnya menjadi pendukung. Kebijakan pembangunan ekonomi pada masing-masing sektor dapat diarahkan antara lain :

- 1) Sektor Perdagangan, hotel dan restoran : Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, baik untuk input maupun *output* industri perdagangan dan jasa, memperluas pasar serta meningkatkan perdagangan antar daerah;
- 2) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi : Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas lalu lintas yang memadai;
- 3) Sektor industri pengolahan : Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui upaya mempertahankan industri yang ada dengan melakukan perbaikan iklim usaha, product development, perluasan pasar, dan pembenahan terhadap hambatan-hambatan untuk memperkuat struktur industri di Kota Probolinggo;
- 4) Sektor Pertanian : Dengan tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu menyebabkan penurunan produksi pada beberapa komoditas pertanian Kota Probolinggo timbulnya hama-hama penyakit yang menyerang tanaman pertanian. Disamping itu terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk pertanian Kota Probolinggo maupun Nasional. Menghadapi tantangan tersebut, maka arah pembangunan pertanian Kota Probolinggo perlu lebih ditekankan kepada peningkatan intensifikasi terutama proteksi tanaman dan hewan, peningkatan kapasitas penyediaan bibit/benih unggul bersertifikat, peningkatan diversifikasi usaha, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung oleh fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi Kota Probolinggo perlu didukung :

- 1) Peningkatan daya saing industri;
- 2) Peningkatan investasi PMA mupun PMDN di Kota Probolinggo;
- 3) Pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya didukung infrastruktur;
- 4) Menginternalisasikan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan;
- 5) Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam bisnis;

- 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, irigasi, listrik, pelabuhan, pusat pemasaran secara bertahap;
- 7) Perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) bagi produk Kota Probolinggo;
- 8) Peningkatan skill pelaku ekonomi melalui berbagai strata UMKM dan industri, Penguatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang tepat, fokus dan tepat sasaran,transparan, keberpihakan, koordinasi dan sinergitas);
- 9) Peningkatan enterpreneurshif sumberdaya manusia Kota Probolinggo, melalui peningkatan linkage antara dunia bisnis dan dunia edukasi diantaranya melalui perbanyak Rencana utama penguatan sektor pertanian yang dinilai mampu bertahan terhadap krisis ekonomi adalah penambahan kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian termasuk perluasan produk agroindustri dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekaligus konservasi lingkungan.
- 10) Pengembangan sistem usaha tani terpadu yang implementasinya melalui pengembangan pertanian organik;
- 11) Pengembangan agroforestry di area lahan kritis;
- 12) Pengembangan hutan mangrove, perikanan tambak, dan pengendalian perikanan tambak.

## **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah**

Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam Pendapatan Daerah menurut PP No. 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas:

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya. Berdasarkan data series kurun waktu 2009-2011, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara persentase dan nominal hanya kelompok komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara konsisten mengalami kenaikan, sedangkan kelompok dana perimbangan menunjukkan kecenderungan penurunan baik secara nominal dan persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sebaliknya, dari tahun ke tahun penerimaan dari dana perimbangan menunjukkan tren menurun. Sedangkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih memperlihatkan tren peningkatan.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2012 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Probolinggo sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Propinsi dan pusat;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dalam peningkatan PAD;
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam Belanja daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah tahun 2012 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda;
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem;
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2012 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun

sebelumnya (multi years), dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS);

- 4) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara
- 6) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
- 7) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI OPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
- 8) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan;
- 9) Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) 2013 maka direncanakan mulai dialokasikan dana cadangan dari APBD perubahan;
- 10) Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Probolinggo tahun 2010-2014 serta peningkatan koordinasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah, maka sesuai dengan kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan, diperlukan dana bantuan kepada masyarakat;
- 11) Dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD, maka dialokasikan dana penyertaan modal kepada BUMD dalam anggaran RAPBD 2012 sesuai dengan kebutuhan, kebijakan pimpinan dan ketersediaan dana;
- 12) Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 13) Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan;
- 14) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

**BAB IV**  
**TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Dalam rangka mempertajam fokus pelaksanaan program-program pembangunan daerah serta meletakkan prioritas-prioritas pembangunan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, maka diperlukan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan, maka masyarakat dan pemerintah Kota Probolinggo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Melalui rumusan tujuan juga dapat diketahui secara cermat seberapa besar pengerahan sumber daya daerah yang harus dilakukan baik yang dimiliki secara aktual maupun potensial.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kota Probolinggo serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai.

Berdasarkan maksud tersebut maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Probolinggo yang akan diwujudkan sampai dengan tahun 2014 dirumuskan sebagai berikut :

**Misi 1 :** Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia;

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Meningkatkan kualitas keagamaan guna mewujudkan suasana yang kondusif bagi pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh golongan masyarakat	Frekuensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan (%)	100
	1.2 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Tingkat kerukunan hidup internal umat beragama (%)	100
	1.3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah	Realisasi penambahan jumlah sarana dan prasarana ibadah keagamaan (%)	100
2. Meningkatkan	2.1 Meningkatnya kualitas	1) Angka melek huruf	95

kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan	pendidikan masyarakat	(%) 2) Rata-rata lama sekolah (tahun)	12
	2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (AKB)	6,5
		2) Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI)	7
		3) Balita dengan gizi buruk (%)	<20
		4) Usia harapan hidup (tahun)	70
	2.3 Meningkatnya kualitas pemuda	1) Jumlah ormas kepemudaan yang berperan aktif (%)	90
		2) Peningkatan peran dan prestasi generasi muda (%)	90
2.4 Meningkatnya kualitas olahraga	1) Peningkatan prestasi yang dicapai dlm bidang olah raga (%)	90	
	2) Meningkatnya pembudayaan olah raga (%)	90	
2.5 Meningkatnya kualitas perempuan	1) Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif (%)	90	
	2) Peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (%)	90	
2.6 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan penduduk miskin	1) Proporsi jumlah PMKS terhadap jumlah penduduk (%)	10	
	2) Proporsi jumlah KK miskin terhadap banyaknya KK (%)	10	

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan	3.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang (%) 85	85
	3.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik	2) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam ikut mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan (%) 85	85
		1) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Gubernur (%) 85	85
		2) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Walikota (%) 90	90
3) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif (%) 80		80	
3.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal	4) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden (%) 85	85	
	1) Jumlah kelompok pelestari budaya lokal yang aktif (%) 80	80	
3.4 Meningkatnya peran serta kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan	2) Tingkat pengembangan budaya lokal (%) 85	85	
	1) Jumlah lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan (%) 85	85	
	2) Ratio swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan jumlah stimulan dari pemerintah (kali) 10	10	

**Misi 2 :** Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1. Meningkatkan struktur perekonomian daerah yang lebih tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal	1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang disertai dengan pemerataan	Angka pertumbuhan ekonomi daerah (%)	8
	1.2 Meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor jasa-jasa (%)	7
	1.3 Meningkatnya kontribusi industri kecil, mikro dan menengah serta koperasi terhadap kesejahteraan masy.	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri (%)	8
	1.4 Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat ketersediaan beras/pangan (%)	100
Tingkat konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras (%)		100	
2 Meningkatkan taraf hidup dan derajat kehidupan masyarakat	2.1 Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat	PDRB per kapita (Juta/Rupiah/Jiwa)	25.607
	2.2 Meningkatnya nilai tabungan masyarakat	Rasio tabungan masyarakat dengan nilai investas (kali)	10
	2.3 Meningkatnya jumlah dan volume usaha kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat	1) Peningkatan jumlah Usaha Ekonomi Produktif (%)	70
2) Pengembangan volume usaha (%)		100	
3 Meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah secara lestari dan berwawasan lingkungan	3.1 Meningkatnya kemanfaatan sumber daya lokal bagi pertumbuhan ekonomi daerah	1) Kontribusi pemanfaatan sumber daya alam pada PAD (%)	5
		2) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sumber daya mineral (%)	5
3.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan	1) Indeks standar pencemaran udara (% kategori baik)	80	
		2) Penurunan kasus pencemaran lingkungan (%)	80

**Misi 3 :** Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung oleh sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1. Meningkatkan investasi yang produktif dan	1.1 Meningkatnya nilai investasi dan penanaman modal,	1) Peningkatan jumlah PMA dan PMDN (%)	80
		2) Peningkatan nilai	80

memberikan manfaat optimal bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran	baik modal dalam negeri maupun modal asing	investasi pembangunan daerah (%)	
	1.2 Meningkatnya daya serap investasi terhadap tenaga kerja lokal	Perluasan lapangan kerja (%)	10
	1.3 Meningkatnya kontribusi investasi terhadap penurunan kemiskinan	1) Tingkat kesesuaian upah pekerja dengan kebutuhan hidup layak (%)	90
		2) Tingkat daya serap tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa (%)	50
1.4 Meningkatnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional	1) Peningkatan nilai ekspor komoditas unggulan (%)	35	
	2) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran (%)	9	
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kota guna menunjang kelancaran arus distribusi barang dan jasa, mobilitas penduduk dan kesejahteraan warga kota	2.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut	1) Prasarana jalan kota dengan kondisi mantap (%)	90
		2) Sarana perhubungan darat dan laut dalam kondisi baik (%)	90
	2.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas umum kota	1) Tingkat kelancaran dan ketertiban arus transportasi kota (%)	90
2) Tingkat ketersediaan fasilitas umum perkotaan (%)			80
2.3 Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih, energi dan telekomunikasi		1) Tingkat kualitas penyediaan air bersih perkotaan (%)	90
	2) Tingkat kualitas penyediaan energi listrik (%)	100	
	3) Tingkat kualitas penyediaan fasilitas telekomunikasi (%)	90	
3. Menciptakan pelayanan publik	3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	1) Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu	100

yang prima bagi konduktivitas investasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	investasi	<p>1) Pelayanan perijinan investasi (%)</p> <p>2) Tingkat komplain terhadap pelayanan perijinan investasi (%)</p>	5
	3.2 Meningkatnya produk-produk kebijakan publik yang berpengaruh baik terhadap iklim investasi	<p>1) Peningkatan jumlah produk hukum perbaikan iklim investasi (%)</p>	10

**Misi 4:** Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum yang disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa belandaskan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan daerah, baik dari aspek kelembagaan, tatalaksana maupun sumber daya aparatur	1.1 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah	<p>1) Jumlah SKPD yang menerapkan Sistem AKIP dengan predikat baik (%)</p> <p>2) Jumlah SKPD yang telah dilakukan analisis jabatan (%)</p> <p>3) Jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis komputer (LAN) (%)</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
	1.2 Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah	<p>1) Jumlah pejabat struktural definitif yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (%)</p> <p>2) Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat (%)</p> <p>3) Tingkat pelanggaran disiplin pegawai (%)</p> <p>4) Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan (%)</p>	<p>100</p> <p>50</p> <p>2</p> <p>50</p>

	1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah	1) Jumlah SKPD yang mendapatkan dan menerapkan standarisasi ISO dalam pelayanan (%) 2) Jumlah SKPD yang telah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (%) 3) Jumlah aparatur pada SKPD yang memahami makna pelayanan publik (%)	100  100  100
2 Meningkatkan kualitas dan harmoni politik lokal guna mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang amanah	2.1 Meningkatnya kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1) Jumlah Perda inisiatif DPRD (%) 2) Persentase capaian target penyelesaian produk hukum oleh DPRD (%)	10  100
	2.2 Meningkatnya harmoni antar organisasi politik	Penurunan angka konflik berlatar belakang kepentingan politik kelompok (%)	90
3 Meningkatkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	3.1 Menurunnya kasus pelanggaran hukum	Penurunan angka pelanggaran hukum (%)	90
	3.2 Menurunnya kasus pelanggaran hak asasi manusia	Penurunan angka pelanggaran HAM (%)	100
	3.3 Meningkatnya upaya-upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia	Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran hukum dan HAM	90
4 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	4.1 Menurunnya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat	1) Angka kriminalitas (%) 2) Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana (%)	5  90
	4.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan suasana yang tentram dan tertib	1) Tingkat implementasi kebijakan Pam Swakarsa (%) 2) Tingkat efektifitas peran RT dan RW dalam penciptaan	90  90

		ketertiban dan ketenteraman masyarakat (%)	
--	--	--	--

## 4.2 Prioritas Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan Kota Probolinggo 2010-2014 adalah TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO MELALUI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN ENGANGGURAN BERBASIS INVESTASI PRODUKTIF DAN BERKESINAMBUNGAN.

Untuk mewujudkan Visi ini telah ditetapkan 4 (empat) misi yang harus diemban yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung oleh sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima;
4. Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum yang disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berlandaskan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik.

Untuk melaksanakan misi ini dan mengacu pada prioritas pembangunan propinsi dan nasional maka ditetapkan Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2012 yaitu : PENINGKATAN SARANA PRASARANA KELENGKAPAN KOTA DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN.

Sedangkan prioritas pembangunan Kota Probolinggo tahun 2012 diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar, pembangunan kawasan selatan dan harmonisasi wilayah utara, tengah dan selatan dengan sasaran prioritas dan kebijakan sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

Sasaran Prioritas :

- a) Makin meningkatnya implemmtasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, tata dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- b) Makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal dan data kependudukan yang valid dan up to date.

Arah Kebijakan Prioritas :

- a) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidari struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas

reformasi birokrasi , perbaikan tata laksana (business proses), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit dan pencapaian kinerja secara optimal;

- b) Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana perimbangan daerah dan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilukada 2012;
- c) Penetapan dan penerapan indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaraskan antara pemerintah daerah dan pusat;
- d) Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat;
- e) Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk.

## 2. Pendidikan;

Sasaran prioritas :

- a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun), menjadi 7,85 tahun pada tahun 2012;
- b) Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (persen) menjadi 4,8 pada tahun 2012;
- c) APM SD/SDLB/MI/Paket A menjadi 95,7 % pada tahun 2012;
- d) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen) menjadi 74,5 pada tahun 2012;
- e) APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen) menjadi 79 pada tahun 2012;
- f) APK PT usia 19-23 tahun (persen) menjadi 27,4 pada tahun 2012;
- g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Arah kebijakan prioritas :

- a) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah;
- b) Peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan;
- c) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- d) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- e) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
- f) Pemantapan sistem pendidikan;
- g) Peningkatan efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan;
- h) Penguatan tata kelola pendidikan;
- i) Peningkatan pendidikan karakter.

## 3. Kesehatan;

Sasaran prioritas :

- 1) Meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu, ditandai dengan:

- a. Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi sebesar 88 persen;
  - b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4) menjadi sebesar 90 persen;
  - c. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi sebesar 85 persen;
  - d. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN 1) menjadi sebesar 88 persen;
  - e. Meningkatnya persentasi balita gizi buruk yang mendapat perawatan menjadi sebesar 100 persen;
  - f. Meningkatnya persentasi balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 75 persen;
  - g. Meningkatnya persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat menjadi 95 persen;
  - h. Meningkatnya jangkauan penyebaran air minum.
- 2) Meningkatnya peserta KB baru;
  - 3) Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah sakit;
  - 4) Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin;
  - 5) Meningkatnya persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan;
  - 6) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan :
    - a. Terkendalikannya prevalensi kasus HIV menjadi sebesar <0,5%;
    - b. Meningkatnya pengetahuan penduduk usia 15-24 tahun tentang HIV dan AIDS;
    - c. Meningkatnya persentase kasus TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan menjadi 87 persen;
    - d. Meningkatnya angka penemuan kasus malaria menjadi 1,5 per 1.000 penduduk.

Arah Kebijakan :

- 1) Pelaksanaan program kesehatan preventi terpadu yang meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care, peningkatan cakupan imunisasi dasar, serta penyediaan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi dasar berkualitas;
  - 2) Revitalisasi program KB ditekankan pada kualitas layanan KB melalui penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan;
  - 3) Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, termasuk peningkatan kualitas layanan fasilitasi pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar.
  - 4) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat terutama obat esensial generik;
  - 5) Penerapan asuransi kesehatan nasional untuk masyarakat miskin dan diperluas secara bertahap.
4. Penanggulangan Kemiskinan;
- Sasaran prioritas :
- Penurunan angka kemiskinan pada kisaran 10,5 – 11,5 persen dari jumlah penduduk.

Arah kebijakan :

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;
  - 2) Peningkatan kualitas serta memperluas kebijakan afirmatif/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan;
  - 3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah termasuk percepatan pembangunan daerah terpencil dan perdesaan;
  - 4) Menata dan meningkatkan kualitas pelaksanaan lembaga jaminan sosial.
5. Ketahanan Pangan;

Sasaran prioritas :

- 1) Terpeliharanya dan meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok;
- 2) Terjaminnya penyaluran subsidi pangan bagi masyarakat miskin;
- 3) Terjaganya stabilitas harga bahan pangan;
- 4) Meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) menjadi sekitar 89,8;
- 5) Terlindunginya dan meningkatnya lahan pertanian pangan;
- 6) Terbangunnya dan meningkatnya luas layanan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- 7) Meningkatnya PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dengan pertumbuhan sekitar 3,2 persen.

Arah kebijakan :

- 1) Meningkatkan produksi pangan terutama daging sapi dan ikan serta mencapai surplus produksi padi untuk memantapkan ketahanan pangan, melalui:
  - a) Perluasan areal / ekstensifikasi dan optimalisasi lahan ;
  - b) Intensifikasi, dengan peningkatan produktivitas (teknologi) dan intensitas tanaman;
  - c) Peningkatan produktivitas dengan penyediaan sarana pertanian (bantuan benih, pupuk) penerapan teknologi dan penyuluhan;
  - d) Peningkatan kualitas pasca panen penurunan losses/susut);
  - e) Mendukung pelaksanaan Undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, melalui :
  - a) Pengelolaan konsumsi dengan melakukan diversifikasi konsumsi pangan, pengembangan industri pangan berbasis tepung dan pangan lokal;
  - b) Stabilisasi harga pangan dalam negeri dengan peningkatan efisiensi distribusi dan logistik pangan;
  - c) Penyediaan pangan bersubsidi untuk keluarga miskin.
- 3) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, melalui :
  - a) Peningkatan mutu pangan melalui pengolahan hasil;
  - b) Peningkatan ketersediaan sumber protein terutama ikan.

6. Infrastruktur;

Sasaran prioritas :

- 1) Sumber daya air;
  - a. Meningkatkan jumlah kawasan yang terlindung dari bahaya banjir dan abrasi pantai, termasuk pemulihan pasca bencana alam;
  - b. Mendukung upaya peningkatan akses penduduk terhadap air minum sesuai target MDG's.
- 2) Transportasi;
  - a. Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
  - b. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antar moda yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi.
- 3) Perumahan dan Permukiman;
  - a. Penyediaan rumah murah dan terjangkau;
  - b. Tersedianya akses air minum bagi penduduk;
  - c. Pembangunan sistem pengolahan air limbah;
  - d. Tersedianya akses terhadap pengolahan limbah;
  - e. Menurunnya luas genangan kawasan perkotaan.
- 4) Penataan ruang;
  - a. Pemantapan kelembagaan badan koordinasi penataan ruang;
  - b. Penegakan peraturan tentang tata ruang.

Arah kebijakan :

- 1) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- 2) Mendukung daya saing sektor riil;
- 3) Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta.

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

Sasaran prioritas :

Meningkatnya iklim investasi dan meningkatnya kondisivitas iklim usaha.

Arah Kebijakan :

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha maka dilakukan upaya-upaya melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, peningkatan infrastruktur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan.

8. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

Sasaran Prioritas :

- 1) Meningkatnya kemanfaatan sumber daya lokal bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan;
- 3) Meningkatnya deteksi dini dan pencegahan bencana.

Arah Kebijakan :

- 1) Meningkatkan potensi sumber daya lokal yang dapat didayagunakan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan pendukung perkuatan dan pengembangan sumber-sumber PAD;

- 2) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya secara berkelanjutan dengan dukungan peran aktif masyarakat;
- 3) Penguatan kapasitas penanggulangan bencana;
- 4) Mendorong keterlibatan dan partisipasi lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana.



1	2	3	4	5	6
		3 Try Out dan UNAS Tingkat SMP dan Menengah	380.000.000		
		4 Pelaksanaan dan Penerimaan Siswa Baru ( PSB )	125.000.000		
		5 Penyediaan Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM)	1.000.000.000		
		6 Pelaksanaan Metodologi Pembelajaran Siswa	125.000.000		
		7 Pelaksanaan Lomba, Pelatihan dan Penelitian Pelajar	250.000.000	82.500.000	
		8 Bantuan Beasiswa bagi Siswa Miskin Berprestasi	85.000.000		
		9 Pelaksanaan Program DAK SMP	1.910.311.000	0	17.600.000.000
		10 Penyediaan bantuan khusus murid miskin ( BKMM)		1.200.000.000	
		11 Relokasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 ( SMKN 3 )			50.000.000.000
		<b>8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>850.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	850.350.000		
		<b>9 Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>62.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	27.650.000		
		2 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	35.000.000		
		<b>10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>604.554.000</b>	<b>0</b>	<b>1.165.900.000</b>
		1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	74.750.000		
		2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	82.500.000		
		3 Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi	111.504.000		
		4 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.000.000		
		5 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34.500.000		
		6 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik	95.800.000		
		7 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.000.000		
		8 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	110.500.000		
		9 Studi visit EPEA ke NTB			667.950.000
		10 workshop pnyusunan KTSP untuk SD/MI			120.000.000
		11 Pelatihan guru MIPA dan SAINS SD/MI			18.985.000
		12 Pelatihan manajemen gugus SD/MI			100.245.000
		13 Workshop metodologi pembelajaran mata pelajaran SMP/MTs			69.000.000
					189720000
		<b>11 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>	<b>331.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olah Raga	271.130.000		
		2 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	60.000.000		
		<b>12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>105.000.000</b>		
		1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	50.000.000		
		2 Pengembangan Kota Sehat	55.000.000		
		<b>13 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>973.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Pendidikan	165.000.000		
		2 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	185.000.000		
		3 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor UPTD Kec. Mayangan	103.700.000		

1	2	3	4	5	6
		4 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor UPTD Kec. Kanigaran	83.700.000		
		5 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor UPTD Kec. Kademangan	94.100.000		
		6 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor UPTD Kec. Kedopok	89.750.000		
		7 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor UPTD Kec. Wonoasih	92.450.000		
		8 Penunjang Administrasi dan Operasional Kantor Pengawas	25.000.000		
		9 Pendataan, kuesioner dan profil pendidikan	60.000.000		
		10 Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi	55.000.000		
		11 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin TK Negeri Pembina	20.000.000		
		<b>14 Basic Education Capacity (BEC-TF)</b>	<b>200.010.000</b>	<b>0</b>	<b>960.000.000</b>
		1 Studi visit EPEA ke NTB			120.000.000
		2 Workshop Penyusunan KTSP Guru SD/MI			188.985.000
		3 Pelatihan Guru MIPA dan SAINS SD/MI			100.245.000
		4 Pelatihan Manajemen Gugus SD/MI			69.000.000
		5 Workshop Metodologi Pembelajaran Mata pelajaran SMP/MTs			189.720.000
		6 Workshop pengembangan KTSP SMP/MTs			57.780.000
		7 Jasa Konsultan			36.000.000
		8 Pelatihan pengelolaan sistem jejaring pendidikan			57.000.000
		9 Workshop pengembangan pembelajaran TIK			57.000.000
		10 Pelatihan penyusunan press release tentang laporan keuangan			42.000.000
		11 Pelatihan penyusunan sistem dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi			42.270.000
		12 Belanja Operasional Kesekretariatan	42.805.000		
		13 Rakor, Sosialisasi dan Pertemuan Internal DPIU/DSC	60.000.000		
		14 Perjalanan Dinas	57.455.000		
		15 Honor Tim Pengelola Kegiatan	24.750.000		
		16 Monitoring dan Evaluasi	15.000.000		
2	Urusan Kesehatan	<b>1 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
		1 Perancangan, Penetapan dan sertifikasi SMM ISO 9001 - 2000	250.000.000		
		<b>2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>		<b>220.000.000</b>	
		1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Pusk dan Jaringannya	500.000.000		
		2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	327.410.000		
		3 Perbaikan Gizi masyarakat	169.930.000		
		4 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	193.450.000		
		5 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk Obat Generik Esensial	600.000.000	-	1.500.000.000
		6 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	35.000.000		
		7 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	134.055.000		
		8 Peningkatan Kinerja Manajemen Kesehatan	24.000.000		
		9 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	50.637.500		
		10 Pendukung Pemenuhan Pelayanan Teknis Operasional Kesehatan di Puskesmas	512.030.000		
		11 Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	900.000.000		
		12 Pelayanan Kespro, lansia dan anak sekolah	304.000.000		
		13 Usulan peralatan kesehatan puskesmas pembantu gawat darurat (PUSTU GADAR)		60.000.000	
		14 Inspeksi sanitasi pengawasan makanan jajanan anak sekolah		30.000.000	
		15 Pengujian jajanan anak sekolah		100.000.000	
		16 Pengawasan jajanan anak sekolah		30.000.000	

1	2	3	4	5	6
		<b>3 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>			
		1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	48.100.000		
		2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	351.173.400		
		<b>4 Pengembangan Lingkungan Sehat</b>			
		1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan sanitasi Dasar	67.500.000		
		2 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	94.590.000		
		3 Pengembangan Kota Sehat	71.000.000		
		4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jamban Keluarga, MCK umum, saluran pembuangan air limbah ( SPAL ) dan sarana umum lainnya	567.230.000		
		<b>5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>			
		1 Penyemprotan/ Fogging sarang nyamuk	160.120.000		
		2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan - bahan Fogging	83.000.000		
		<b>6 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	44.402.500		
		1 Peningkatan Imunisasi	97.990.000		
		<b>7 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>			
		1 Pelayanan Operasi Katarak	24.162.000.000		
		2 Pelayanan Sunatan Massal	438.000.000		
		3 Pelayanan Kesehatan Kasus Sensitif	6.625.000		
		<b>8 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Pustu dan Jaringannya</b>			
		1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan Puskesmas dan Pustu			2.252.000.000
		2 Pengadaan sarana dan prasarana Alkes Puskesmas dan Pustu			1.350.000.000
		3 Penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	510.200.000		
		<b>1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>7.710.000.000</b>		
		1 Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000		
		2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	600.000.000		
		3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.000.000		
		4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	120.000.000		
		5 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	100.000.000		
		6 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	275.000.000		
		7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	20.000.000		
		8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000		
		9 Penyediaan tenaga pendukung kelancaran kantor	225.000.000		
		10 Penyediaan penunjang tupoksi kantor	60.000.000		
		11 Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	100.000.000		
		12 Penyediaan Gas dan Tabung PMK	25.000.000		
		13 Penyediaan jasa pelayanan kantor	6.000.000.000		
		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>505.000.000</b>		
		1 Pengadaan Alat Kantor ,Alat Rumah Tangga	220.000.000		
		2 Pengadaan alat bengkel tidak bermesin	30.000.000		
		3 Pengadaan tanaman	25.000.000		
		4 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /Operasional	60.000.000		
		5 Pemeliharaan rutin /berkala meubeler	10.000.000		
		6 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor	60.000.000		

1	2	3	4	5	6
		7 Pemeliharaan rutin /berkala alat bengkel bermesin	65.000.000		
		8 Pemeliharaan rutin /berkalaTanaman	35.000.000		
		<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100.000.000</b>		
		1 Pengadaan Pakaian kerja lapangan	20.000.000		
		2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu	75.000.000		
		3 Penyelenggaraan Peringatan Hari hari besar	5.000.000		
		<b>4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	610.000.000		
		1 Pendidikan dan pelatihan Formal	10.000.000		
		2 Peningkatan SDM Aparatur Rumah Sakit	600.000.000		
		<b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	35.000.000		
		1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10.000.000		
		2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	25.000.000		
		<b>6 Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik</b>			
		1 Perancangan, Penetapan dan Sertifikasi ISO 9001 : 2000	65.000.000		
		<b>7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>			
		1 Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kamar Obat	400.000.000		
		<b>8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>			
		1 Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit	40.000.000		
		<b>9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>		<b>400.000.000</b>	
		1 Pelayanan KesehatanMaskin di RSUD (Jamkesda)	900.000.000		
		2 Promosi kesehatan di RSUD		50.000.000	
		3 Pemulihan pasien balita gizi buruk di RSU		150000000	
		4 Pemulihan gizi bagi pasien penyakit menular di RSU		100000000	
		5 Pemulihan gizi bagi pasien ibu hamil dan menyusui di RSU		100000000	
		<b>10 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>			
		1 Penetapan Akreditasi Rumah Sakit			
		<b>11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	25.000.000		
		1 Pengembangan Kota Sehat			
		<b>12 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Rumah Sakit</b>		<b>11.200.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>
		1 Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit	5.950.000.000		
		2 Pengadaan Meubeler Rumah Sakit	50.000.000		
		3 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,			
		4 Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll.	125.000.000		
		5 Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit (tersk. Mamin pasien)			
		6 Pengadaan Alat - Alat Laboratorium Rumah Sakit	165.000.000		
		7 Pengadaan Alat Kedokteran RSUD		2.500.000.000	5.000.000.000
		8 Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai			
		9 Rehab gedung Ruang Rawat Inap Anak		1.500.000.000	
		10 Pengadaan Pembangunan Gedung Paviliun Tahap II		2.000.000.000	
		11 Pengadaan Alat Kedokteran RSUD		2.500.000.000	5.000.000.000
		12 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua		150.000.000	1.000.000.000
		13 Pengadaan Hardware / PC		200.000.000	
		14 Pembangunan dan Rehab Gedung		350.000.000	

1	2	3	4	5	6
		15 Pegadaaan Ambulan Pasien dan Jenasah		1.000.000.000	
		16 Pelayanan antar jemput pasin bagi masyarakat miskin diwilayah Kota Probolinggo		1.000.000.000	1.000.000.000
		<b>13 Program Pemeliharaan Sarana &amp; Prasarana Rumah Sakit</b>	<b>795.000.000</b>		
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	450.000.000		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	55.000.000		
		3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Air Minum	40.000.000		
		4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran	250.000.000		
		<b>14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>700.000.000</b>		
		1 Kemitraan Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Perusahaan	500.000.000		
		2 Kemitraan Pelayanan Dokter Spesialis	200.000.000		
		<b>15 Program Pemenuhan Pelayanan Dasar &amp; Jaminan Sosial</b>			
		1 Bantuan dan Perlindungan Sosial	10.000.000		
3	Urusan Pemuda dan Olahraga	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
		1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	34.155.000		
		2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000		
		3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	250.000.000		
		4 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	58.500.000		
		5 Rapat-Rapat Kordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	10.000.000		
		6 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	505.400.000		
		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	32.000.000		
		2 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	78.000.000		
		3 Pengadaan/Pembangunan Taman	10.000.000		
		4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor	100.000.000		
		5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional	76.700.000		
		6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	40.250.000		
		7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	21.000.000		
		<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	32.500.000		
		2 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	60.000.000		
		3 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja	5.000.000		
		<b>4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
		1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.500.000		
		2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	6.000.000		
		3 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	9.000.000		
		<b>5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			
		1 Morning on Panglima Sudirman Street (MPS2)	46.000.000		

1	2	3	4	5	6
4	Urusan Kebudayaan	<b>6 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>			
		a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Kelompok Usaha Pemuda Produktif - KUPP)	300.000.000		
		b. Jambore Pemuda	75.000.000		
		c. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	100.000.000		
		d. Pembinaan pemuda pelopor	50.000.000		
		e. Pameran prestasi hasil karya pemuda	75.000.000		
		<b>7 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>			
		1 Pelatihan Kewirausahaan	200.000.000		
		2 Pelatihan Ketrampilan bagi pemuda	250.000.000		
		<b>8 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>			
		1 Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah	109.680.000		
		2 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	60.600.000		
		3 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga - Kompetisi Bola Voly Daerah	107.550.000		
		4 Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat - Penyelenggaraan Tryatlon	94.200.000		
		5 Penghargaan kepada insan olahraga yang berdedikasi & berprestasi	60.500.000		
		6 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi -Pembentukan pengurus FORMI&pelatihan senam		40.000.000	
		7 Pemasalan olah raga bagi pelajar mahasiswa dan ,masyarakat		60.000.000	
		<b>9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>			
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	313.849.500		
		2 Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Pelaksanaan Olahraga	418.950.000		
		<b>1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>			
		1 Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	572.500.000		
		<b>2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>			
		1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah - Penyelenggaraan Semipro (11 Kegiatan)	372.500.000		
		2 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah - Kesenian Pesisir Utara	65.000.000		
		3 Festival Jaran Bodhag	37.500.000		
		4 Audisi Pemberdayaan Penari Jatim	20.000.000		
		5 Gelar Budaya Jatim	25.000.000		
		6 Festival Lagu Daerah	20.000.000		
		7 Festival Karya Seni	20.000.000		
		8 Fistival Film	20.000.000		
		9 Penampilan Kesenian dalam rangka Hari Jadi JATIM (Sandra Tari dan Pawai Budaya)	65.000.000		
		10 Pembinaan pada Seniman - Pelatihan Kesenian	50.000.000		
		11 Saresahan Kebudayaan	20.000.000		
12 Pawai Budaya Daerah	40.000.000				
13 Pelatihan dan Bantuan Peralatan Kesenian	1.685.000.000				
14 Tampilan budaya anjungan jatim ( TMII)	75.000.000				

1	2	3	4	5	6
		<b>3 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b> 1 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah - Pawai dan Tampilan Budaya di Jembrana 55.000.000 - Tampilan Budaya Anjungan Jatim (TMII) 65.000.000 - Pawai dan Tampilan Budaya dalam Rangka Hari jadi Kota Banyuwangi (Kuwung Bayuwangi) 40.000.000  <b>4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b> 1 Pembangunan PIP terminal Bayuangga 100.000.000 2 Pembanguna panggung kesenian 100.000.000 3 Pembanguna Pavingisasi dan tamanisasi 100.000.000 4 Pembangunan wista tirta ketapang 200.000.000 5 Pembangunan wisata tirta dan kolam renang ( Sebelah barat pasar wonoasih ) 700.000.000			
5	Urusan Sosial	1 Morning on Panglima Sudirman Street (MPS) 40.000.000 2 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional 50.000.000 3 Monitoring dan Evaluasi 75.000.000 4 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 110.000.000 5 Pemberian Bantuan Kambing Pada Keluarga PMKS Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan 75.000.000 6 Pemberian Sembako Untuk Keluarga Balita Terlantar 180.000.000 7 Taliasih 28.000.000 8 Cetak Kalender Himbauan Sosaial 25.000.000 9 Pembuatan Banner Himbauan Sosial 15.000.000 10 Cetak Leaflet Himbauan Sosial 10.500.000 11 Pembuatan Neon Box Himbauan Sosial 45.000.000 12 Pendidikan Ketrampilan dan Bantuan Peralatan bagi pekerja migran terlantar 250.000.000 13 Jaminan Sosial Bagi Lansia Terlantar 240.000.000 14 Sosialisasi Bagi Ibu Rumah Tangga Tentang Pola Asuh Anak 150.000.000 15 Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Pemulung dan Anak Putus Sekolah Yang Turun ke Jalanan 900.000.000 16 Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Penyandang Cacat 80.000.000 17 Bantuan Peralatan Usaha Bagi Fakir Miskin 150.000.000 18 Bantuan Sembako Untuk Fakir Miskin 200.000.000 19 Bantuan dan Perlindungan Sosial 150.000.000 20 Juru Kunci Makam 22.500.000 21 Bantuan Peralatan Kesehatan Bagi Lansia 20.000.000			
6	Urusan Pemberdayaan Perempuan	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Kantor</b> 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.000.000 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 190.000.000 3 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor (Tenaga Kontrak) 12.000.000 4 Penunjang Administrasi & Operasional Rutin Kantor/Kedinasan (Atk Cetak,makan minum, Rapat RPA, Honor Pengadaan barang,Pengelolaan KEU,telpon,Listrik,alat kebersihan,Sertifikasi SMM ISO 9001:2008.) 390.000.000  <b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> 1 Pembangunan Gedung Kantoran/bangunan lainnya Pendukung Bangunan Gedung Kantor 70.000.000			

1	2	3	4	5	6
		2 pengadaan Alat Kantor,Alat Rumah Tangga,Komputer dll (lemari, meja,kursi,laptop,printer, mesin absensi, time recorder)	170.000.000		
		3 Pengadaan Taman	25.000.000		
		4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	25.000.000		
		5 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional (Roda 4 Lima Buah,,Bis,Ferosa,inova,Mupen,Kijang..dan Sepeda motor)	85.000.000		
		6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	17.000.000		
		7 Pemeliharaan Rutin / Berkala taman	15.000.000		
		8 pengadaan Alat Kantor,Alat Rumah Tangga,Komputer dll (lemari, meja,kursi,laptop,printer, mesin absensi, time recorder)	170.000.000		100.000.000
		<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Kopri/Olah raga/Khusus. (Batik, seragam Khaki )	75.000.000		
		2 Penyelenggaraan Peringatan & Upacara Hari-hari besar Nasional	45.000.000		
		3 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja	10.000.000		
		<b>4 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
		1 Bimtek/ Workshop/Sosialisasi/Seminar Implemetasi Peraturan PerUU	47.000.000		
		2 Pelaksanaan Study Banding/kunjungan Kerja	70.000.000		
		<b>5 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak &amp; Perempuan</b>			
		1 Pelaksanaan sosialisasi : Gender Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	20.000.000		
		2 Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	250.000.000		
		<b>6 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender &amp; Anak</b>			
		1 Pengembangan sistem informasi gender & anak (Pembuatan Profil Gender)	30.000.000		
		2 Fasilitasi Komisi Perlindungan Anak (anak yang bermasalah dengan hukum,disneker,dinas sosial dan LPA	55.000.000		
		3 Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) ,pendidikan, kesehatan, posyandu, gizi buruk, toma toga, karang kitri, koperasi, pondok pesantren, PHBS Perilaku hidup bersih dan sehat,	45.000.000		
		<b>7 Peningkatan Kualitas Hidup &amp; Perlindungan Perempuan (Pendidikan)</b>			
		1 Sosialisasi Sistem Pencatatan & Pelaporan KDRT	25.000.000		
		2 Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak kekerasan	100.000.000		
		<b>8 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>			
		1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (GOW)	50.000.000		
		2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender (5 kecamatan Bordir dan jahit)	55.000.000		
		3 Kegiatan Penyuluhan Bagi Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera (GSI, Kecamatan sayang ibu,BUMIL dan BUTEK)	45.000.000		
		4 Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3eL) (pekerja rumahan Istri Nelayan,pemberian sarana)	80.000.000		

1	2	3	4	5	6
7	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<p>9 <b>Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Bangsa</b></p> <p>1 Pameran Pembangunan dan Promosi Pasar Murah (momen2 tertentu lainnya, harijadi kota,hari2 besar islam, hari jadi Propinsi)</p> <p>10 <b>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b></p> <p>1 Pentas Seni dan Budaya,Festifal,Lomba cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan. (Semipro)</p> <p>11 <b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b></p> <p>1 Morning on Panglima Sudirman Street (MPS2)</p> <p>12 <b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b></p> <p>1 Perlindunagn terhadap perempuan dan pelayanan tindak kekerasan</p> <p>2 Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak kekerasan</p> <p>1 <b>Keluarga Berencana</b></p> <p>1 Penyediaan Pelayanan KB &amp; Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin (Momentum, KB TNI,Gerak PKK, Dharma wanita, Bhayangkara, Sosuialisasi tingkat kecamatan)</p> <p>2 Pelayanan penanganan akibat pemakaian kontrasepsi</p> <p>3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pendataan Keluarga miskin dan keluarga ikut KB, 1100 Kader Pendata)</p> <p>4 Pembinaan Kader Berprestasi</p> <p>5 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi</p> <p>2 <b>Kesehatan Reproduksi Remaja</b></p> <p>1 Pengumpulan data Laporan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Pengolahan Data</p> <p>3 <b>Pelayanan Kontrasepsi</b></p> <p>1 Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB</p> <p>2 Pelayanan KB Medis Operasi (MOP, MOW Bagi Gakin )</p> <p>4 <b>Pembinaan Peranserta Masyarakat &amp; Pel KB / KR Yang Mandiri</b></p> <p>1 Operasional Pembinaan Institusi Masyarakat (PPKBK / SUB "RW")</p> <p>2 Pembinaan Keluarga BKB, BKR, BKL, &amp; PKLK</p> <p>5 <b>Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR</b></p> <p>1 Fasilitas Forum pelayana informasi KRR bagi kelompok remaja</p> <p>2 pembinaan pusat informasi dan konsultasi</p> <p>3 Fasilitas forum pertemuan anggota saka kencana</p> <p>6 <b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b></p> <p>1 Pelaksanaan sosialisasi : Gender Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (5 kecamatan)</p> <p>2 Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK</p> <p>3 Mengikuti pameran prodak unggulan lokal maupun luar kota</p>	<p>20.000.000</p> <p>20.000.000</p> <p>30.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>105.000.000</p> <p>20.000.000</p> <p>180.000.000</p> <p>30.000.000</p> <p>20.000.000</p> <p>5.090.000</p> <p>20.000.000</p> <p>70.000.000</p> <p>192.000.000</p> <p>40.000.000</p> <p>10.000.000</p> <p>20.700.000</p> <p>25.000.000</p> <p>50.000.000</p> <p>250.000.000</p>	<p>40.000.000</p> <p>50.000.000</p>	

1	2	3	4	5	6
		<b>7 Program Keluarga Berencana</b>			
		1 Gebyar paguyuban KB dan Pembangunan penghargaan peserta KB lestari dan KB pria		76.125.000	
		2 Revitalisasi Tribina BKB ( Bina Keluarga Balita		13.600.000	
		3 Revitalisasi Tribina BKR ( Bina Keluarga Remaja )		7.990.000	
		4 Revitalisasi Tribina Keluarga Lingkungan		4.960.000	
		5 Pembinaan atau Monev kelompk UPPKS		8.550.000	
8	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	1 PMT-AS	1.400.000.000		
		2 Evaluasi Kelurahan Berhasil	40.000.000		
		3 Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan	35.000.000		
		4 Profil Kelurahan	50.000.000		
		5 Pelatihan Sektor Informal	50.000.000		
		6 Pemberian stimulan pada usaha sektor informal	70.000.000		
		7 Bantuan Raskin	400.000.000		
		8 Operasional Penyakuran Raskin	300.000.000		
		9 Pemberian Bnatuan Peralatan TTG	60.000.000		
		10 Gelar TTG Nasional	80.000.000		
		11 Pengembangan TTG bekerjasama dengan perguruan tinggi/LSM	75.000.000		
		12 Operasional LPM	60.000.000		
		13 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	60.000.000		
		14 Operasional Tim Pokjanel Posyandu	50.000.000		
		15 Bantuan meja/kursi posyandu	82.500.000		
		16 Pembinaan LPM	15.000.000		
		17 Stimulan dana pembangunan kel.	580.000.000		
		18 BOP LPM, FK LPM, DPD Ass LPM	170.000.000		
		19 Lomba administrasi RT/RW	15.000.000		
		20 Pendampingan PNPM MP	150.000.000		
		21 Bansos BLM-BKM ( PNPM-MP)	600.000.000		2.000.000.000
		22 Bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan	7.500.000	50.000.000	
		23 Bensos BLM - BKM ( PNPM - MP )	600.000.000		1.500.000.000
		24 Pendidikan Kemasyarakatan dalam pmbangunan dn peningkatan kualitas masyarakat Desa/Kelurahan ( PKPKM )	7.500.000	50.000.000	
		25 Peningkatan keberdayaan masyarakat (PKM)		200.000.000	
		26 Pembangunan Labsite		25.000.000	
		27 Pengembangan Labsite		25.000.000	
1	<b>Misi 2</b> Urusan Kelautan dan Perikanan	<b>1 Pengembangan Perikanan Tangkap</b>			
		1 Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap	50.000.000		
		2 Introduksi pemakaian energi alternatif untuk kapal ikan	50.000.000		
		3 Introduksi pemakaian alat bantu tangkap	30.000.000		
		4 Bantuan Sarana Penangkapan Ikan	150.000.000		
		<b>2 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut</b>			
		1 Pengelolaan & Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Hutan Mangrove	70.000.000		
		2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Perairan Umum	25.000.000		
		3 Bantuan sarana pengolahan dan pemasaran		300.000.000	
		<b>3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</b>			
		1 Pembinaan Sistem POKMASWAS	90.000.000		
		2 Peningkatan Sistem Pengawasan	25.000.000		

1	2	3	4	5	6
		4 Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			
		1 Pengembangan Konservasi Laut dan Hutan Mangrove	50.000.000		
		2 Pengembangan Ekowisata dan Taman Hiburan Rakyat Berbasis Pantai	100.000.000		
		3 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Perlindungan & Konservasi Sumberdaya Kelautan	30.000.000		
		4 Restocking Sumberdaya Perikanan	80.000.000		
		5 <b>Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut</b>			
		1 Patroli Keamanan Laut dan Perawatan Sarana Pengawasan	50.000.000		
		2 Sosialisasi Hukum dan Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan	35.000.000		
		6 <b>Revitalisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan</b>			
		1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan Ketapang			200.000.000
		2 Pengembangan Fasilitas Operasional PPP Mayangan DAK			1.800.000.000
		7 <b>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>			
		1 Bantuan untuk nelayan dan pembudidaya miskin	100.000.000		
		8 Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat			
		1 Lomba Canoe	80.000.000		
		2 Probolinggo Sail	200.000.000		
		9 <b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>			
		1 Pengembangan dan rehabilitasi sarana prasarana budidaya perikanan		500.000.000	
		2 Pengembangan sarana prasarana penunjang pembenihan			1.370.000.000
		3 Pengembangan pusat aguabis		1.000.000.000	
		4 Normalisasi saluran air		500.000.000	
		5 Pembangunan BBI			1.270.000.000
		10 <b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>			
		1 Pembangunan sarana prasarana pendaratan ikan ketapang			500.000.000
		2 Pengembangan TPI ( Tempat Pelelangan Ikan )			500.000.000
		3 Pengembangan ekowisata berbasis pantai		300.000.000	
		4 Peningkatan sistem pengawasan		200.000.000	
		5 Bantuan sarana penangkapan ikan		25.000.000	
		11 <b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</b>			
		1 Balai penyuluhan			500.000.000
		2 Pengembangan SDM Pengolahan dan Pembudidaya ikan		400.000.000	
		3 Lomba cipta menu ikan		150.000.000	
		4 Pengembangan sarana prasarana penyuluhan		500.000.000	
		5 Gema insani		300.000.000	
		Pengembangan sarana prasarana penyuluhan			500.000.000
		12 <b>Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap</b>			
		1 Pengembangan dan rehabilitasi ekosistem perairan (rumah ikan dan restocking )		350.000.000	
		2 Pengembangan teknologi tangkap			250.000.000
		3 Introduksi pemakaian energi alternatif untuk kapal ikan			200.000.000

1	2	3	4	5	6
		4 Introduksi pemakaian alat bantu penangkapan		300.000.000	
		5 Pembangunan sarana dan prasarana pendaratan ikan ketapang			500.000.000
		<b>13 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan</b>			
		1 Pengembangan Kawasan Minapolitan tangakap		5.000.000	
		2 Kawasan budidaya perikanan prcontohan			1.000.000.000
		3 Pembangunan jalan masuk akses tambah			1.100.000.000
		4 Mini Cold Storage			300.000.000
		5 Pengembangan kawasan Minapolitan budidaya			1.500.000.000
		<b>14 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>			
		1 Kegiatan fasilitasi hasil pengolahan dan pemasaran bidang perikanan		400.000.000	
		2 Operasional BBI ( Balai Benih Ikan )		350.000.000	
		3 Peningkatan sarana pendukung operasional TPI (Tempat Pelelangan Ikan)		300.000.000	
2	Urusan Perdagangan	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>529.400.000</b>		
		1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.500.000	-	-
		2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	150.000.000	-	-
		3 Penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	18.200.000	-	-
		4 Penunjang Adm. dan operasional rutin kantor/kedinasan	354.700.000	-	-
		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>283.000.000</b>	-	-
		1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	45.000.000	-	-
		2 Pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, komputer	60.000.000	-	-
		3 Pengadaan/pembangunan taman	33.000.000	-	-
		4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan bangunan lainnya pendukung bangunan gedung kantor	35.000.000	-	-
		5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dan kendaraan dinas/operasional	55.000.000	-	-
		6 Pemeliharaan rutin berkala/Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	15.000.000	-	-
		7 Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor, alat rumah tangga komputer	20.000.000	-	-
		8 Pemeliharaan rutin berkala taman	20.000.000	-	-
		<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>152.000.000</b>	-	-
		1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/pakaian korpri/pakaian olah raga pakaian khusus hari-hari tertentu	36.000.000	-	-
		2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Upacara Hari-hari besar Nasional	110.000.000	-	-
		3 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja	6.000.000	-	-
		<b>4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>125.000.000</b>	-	-
		1 Pelaksanaan Study banding/Kunjungan Kerja dll	125.000.000	-	-
		<b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>32.500.000</b>	-	-
		1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000	-	-
		2 Penyusunan RKA, dan RAPBD SKPD	7.500.000	-	-
		<b>6 Program Pengembangan Data/ Informasi</b>	<b>35.000.000</b>	-	-
		1 Penyusunan Master Plan e-Government	35.000.000	-	-

1	2	3	4	5	6
		<b>7 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>25.000.000</b>	-	-
		1 Kegiatan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	25.000.000	-	-
		<b>8 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>100.000.000</b>	-	-
		1 Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Operasional.	50.000.000	-	-
		2 Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang	50.000.000	-	-
		<b>9 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan</b>	<b>737.000.000</b>	-	-
		1 Kegiatan Penyuluhan peningkatan disiplin Pedagang kaki Lima ( PKL ) dan Asongan	50.000.000	-	-
		2 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL dan Asongan	687.000.000	-	-
		<b>10 Program Peningkatan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>62.000.000</b>	-	-
		1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	40.000.000	-	-
		2 Kegiatan Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	22.000.000	-	-
		<b>11 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>			
		1 Program penciptaan iklim UKM yang Kondusif			2.200.000.000
		2 Pengadaan Gedung Dekranasda			100.000.000
		3 sosialisasi kebijakan tentang UKM		150.000.000	
		4 Pengadaan Kanopi di area len - jelanan			1.200.000.000
		5 Penataan tempat berusaha dan pemberdayaan PKL		665.000.000	
		<b>12 Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri</b>			950.000.000
		Program pningkatan kapasitas teknologi industri			750.000.000
		Pengembangan sarana dan prasarana kampung meubel			200.000.000
		Pembinaan perdagangan dan industri hasil tembakau / rokok			
3	Urusan Perindustrian	<b>1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>30.000.000</b>		
		1 Pengembangan Kota Sehat	30.000.000	-	-
		<b>2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>50.000.000</b>		
		1 Pengembangan Sebaran Pemakaian Garam Beryodium	50.000.000	-	-
		<b>3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	<b>650.000.000</b>		
		1 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	650.000.000	-	-
		<b>4 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>			<b>200.000.000</b>
		1 Pembinaan Pedagang dan Industri Hasil Tembakau / Rokok	-	-	200.000.000
		<b>5 Program pengembangan pengolahan kelestarian energi mineral dan migas</b>			
		1 Pembuatan PJU tenaga surya			9.982.000.000
4	Urusan Energi dan Sumberdaya mineral	<b>1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</b>	<b>441.000.000</b>	-	-
		1 Kegiatan Sosialisasi Regulasi mengenai kegiatan penambangan	41.000.000	-	-
		2 Kegiatan Monitoringm Evaluasi dan Pelaporan	86.000.000	-	-
		3 Kegiatan Operasional Pengadaan Air Bersih	314.000.000	-	-

1	2	3	4	5	6
5	Urusan Pariwisata	<b>2 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan</b>	<b>815.500.000</b>	-	-
		1 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	815.500.000	-	-
6	Urusan Pertanian	<b>1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>			
		1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara	260.000.000		
		2 Pelaksanaan Pemilihan Kang dan Yuk	100.000.000		
		3 Pelaksanaan utusan duta wisata/raka raki Jawa Timur dan anugrah wisata	10.000.000		
		4 Petik laut	100.000.000		
		Pengiriman Festival Makanan Khas ke Jawa Timur	10.000.000		
		5 Koordinasi Pawai Budaya, Pameran, Festival & Lomba	175.000.000		
		<b>2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>			
		1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan			
		- Kerapan Kambing	40.000.000		
		- Kerapan Sapi Brujul	40.000.000		
		- Festival Teater Remaja	20.000.000		
		- Kolaborasi busana daun dan busana batik	60.000.000		
		2 Pembangunan PIP Terminal Bayuangga			100.000.000
		3 Pembangunan kanopi panggung kesenian			100.000.000
		4 Pembangunan wisata tirta Ketapang			200.000.000
		5 Pembangunan wisata tirta Pilang			200.000.000
		6 Pembangunan wisata air dan kolam pancing			700.000.000
		7 Pembangunan pemandian sumber mata air Wonoasih & Sumber Wetan (Kampung Wisata)			1.250.000.000
		<b>3 Program Pengembangan Kemitraan</b>			
		1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	125.000.000		
		2 Pembinaan dan Pendataan Ketenagakerjaan Bidang Pariwisata	10.000.000		
		3 Pengadaan cetakan booklet, leaflet, poster pariwisata dll	25.000.000		
1 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	50.000.000				
	25.000.000				
2 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	25.000.000				
3 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	200.000.000				
4 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	150.000.000				
5 Pengembangan Lumbung Pangan Desa/Kelurahan	350.000.000				
6 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	300.000.000				
<b>1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>					
1 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	200.000.000				
<b>2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>					
1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	750.000.000				
2 Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal			5.350.000.000		
<b>3 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>					
1 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	700.000.000		500.000.000		
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	175.000.000				
3 Penyuluhan Peningkatann Produksi Tanaman Perkebunan			750.000.000		

1	2	3	4	5	6
		4 Sosialisasi Peningkatan Pengembangan Tanaman Perkebunan	300.000.000		
		<b>4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>			
		1 Pengembangan Agribisnis Peternakan	500.000.000		
		2 Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	200.000.000		
		3 Pembibitan dan Perawatan Ternak	350.000.000		
		<b>5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>			
		1 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	300.000.000		
		<b>6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>			
		1 Pembuatan Sumur Resapan	375.000.000		
		2 Konservasi Sumber Mata Air	300.000.000		
		<b>7 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan</b>			
		1 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan	150.000.000		
		2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	150.000.000		
		<b>8 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>			
		1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam RHL	500.000.000		
		<b>9 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</b>			
		1 Sosialisasi PERDA mengenai Pengelolaan Hasil Hutan	100.000.000		
		2 Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Tata Usaha Kayu	100.000.000		
		3 Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan PERDA mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan	100.000.000		
		<b>10 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>			
		1 1.Penelitian dan pengembangan Teknologi pertanian / perkebunan tepat guna -Pelatihan pembuatan pupuk organik=60kelompok tani - Pengadaan Alat Pengolah pupuk organik=10unit		200.000.000	
		2 Penelitian dan pengembangan Teknologi pertanian / perkebunan tepat guna		300.000.000	
		3 Penelitian dan pengembangan Teknologi pertanian / perkebunan tepat guna		250.000.000	
		4 Pengembangan irigasi tanah dangkal		500.000.000	5.000.000.000
		5 Pengembangan irigasi tanah dangkal		350.000.000	
		<b>11 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>			
		1 Pengembangan Bibit unggul pertanian/perkebunan		250.000.000	
		2 Pembembangan bibit unggul pertanian/perkebunan		500.000.000	
		3 Pengembangan Bibit unggul Pertanian/Perkebunan		100.000.000	
		4 Penyuluhan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan		750.000.000	
		5 Peningkatan pengembangan tanaman perkebunan		250.000.000	
		6 Peningkatan Pengembangan Tanaman perkebunan		100.000.000	
		7 Peningkatan Pengembangan tanaman perkebunan		75.000.000	
		<b>12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>			
		1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit menular ternak			

1	2	3	4	5	6	
		2 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 3 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 4 Renovasi rumah potong hewan 5 Pngadaan peralatan pendukung rumah potong hewan  <b>13 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b> 1 Pengembangan Agribisnis Peternakan 2 Pendistribusian Bibit ternak kepada Masyarakat 3 Pembibitan dan Perawatan Ternak 4 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang Didistribusikan kepada masyarakat  <b>14 Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b> 1 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 2 Penanganan panca panen dan pengolahan hasil pertanian 3 Pengembangan lumbung pangan Desa/ Kelurahan 4 Pengembangan lumbung pangan Desa/ Kelurahan 5 Pengembangan Lumbung pangan Desa/Kelurahan  <b>15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b> Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan  <b>16 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b> 1 Pengembangan Kebun bibit kelurahan 2 Pedidikan /pelatihan bagi masyarakat hutan ( perwakilan penyuluhan kehutanan)		500.000.000 300.000.000 350.000.000  500.000.000 150.000.000 150.000.000 250.000.000 500.000.000 500.000.000  150.000.000  100.000.000 50.000.000		
7	Urusan Tenaga Kerja	<b>1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja:</b>  1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja. 2 Penyuluhan dan Pencarian Lowongan AKL, AKAD. 3 Pendataan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP). 4 Usaha Mandiri Sektor Informal. 5 Ketransmigrasian. 6 Pemandu dan Bimbingan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT). 7 Pemanduan dan Bimbingan Usaha Terapan Teknologi Padat Karya (TPK). 8 Penyuluhan dan Sosialisasi Antar Kerja Antar Negara. 9 Bursa Kerja Online. 10 Padat Karya Produktif Pembuatan Kolam Ikan. 11 Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 12 Pemberdayaan Dewan Pengupahan 13 Penerapan Tim Deteksi Dini 14 Pembinaan syarat-syarat kerja dan kesejahteraan pekerja 15 POR Pekerja 16 MTQ Pekerja 17 Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Kerja : a. Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja b. Pelatihan ketrampilan berbasis masyarakat c. Pelatihan alih profesi 18 Operasional Kios 3 in 1	114.500.000 35.685.000 25.000.000 61.727.000 75.000.000 65.032.000 65.000.000 35.000.000 30.391.000 150.000.000 30.000.000 135.000.000 35.000.000 30.000.000 60.000.000 60.000.000 450.000.000 450.000.000 100.000.000 125.000.000			

1	2	3	4	5	6
		19 Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja			
		a.Pembangunan Lanjutan BLK	900.000.000	500.000.000	2.500.000.000
		b.Pelatihan Berbasis Kompetensi			550.000.000
		c.Pelatihan MTU			550.000.000
		<b>2 Program Pengawasan &amp; Perlindungan Tenaga Kerja</b>			
		1 Pembinaan Norma K3	60.000.000		
		2 Pelatihan dan Sertifikasi Teknis	90.000.000		
		3 Peningkatan Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek	60.000.000		
		4 Monitoring dan Evaluasi	80.000.000		
		5 Peningkatan pengawasan Norma K3	50.000.000		
		<b>3 Program Pembangunan Lingkungan Sehat</b>			
		1 Pengembangan Kota Sehat	70.000.000		
		<b>4 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</b>			
		1 Kegiatan ketrampilan berbasis masyarakat		450.000.000	
		2 Pelatihan Alih profesi		100.000.000	550.000.000
		3 Pelatiha MTU ( Mobile Trening Unit )			55.000.000
		4 Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi			
		<b>5 Program Perluasan dan Penempatan Kerja</b>			
		Penyuluhan dan pncarian lowongan AKL, AKAD		35.685.000	
		Pembantuan dan bimbingan usaha terapan teknologi padat karya		60.000.000	
		Penyuluhan dan sosialisasi antar kerja antar negara		35.000.000	
		Pemanduan dan bimbingan usaha terapan teknologi tepat guna		250.000.000	175.000.000
		Padat karya produktif pembuatan kolam ikan			
8	Urusan Koperasi dan UKM	<b>1 Program Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif</b>	<b>165.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	-
		1 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	-	50.000.000	-
		2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	125.000.000		-
		3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40.000.000		-
		<b>2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>375.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	-
		1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	75.000.000	-	-
		2 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	300.000.000	-	-
		3 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	-	120.000.000	-
		<b>3 Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah</b>	<b>900.000.000</b>	-	-
		1 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM	100.000.000	-	-
		2 Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	80.000.000	-	-
		3 Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah	100.000.000	-	-
		4 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Hasil Produk UKM	100.000.000	-	-
		5 Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	520.000.000	-	-
		<b>4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>700.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	-
		1 Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	60.000.000	-	-
		2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian		50.000.000	-

1	2	3	4	5	6		
9	Urusan Lingkungan Hidup	3	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	600.000.000	-	-	
		4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40.000.000	-	-	
		<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
		1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	400.000.000			
		2	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	750.000.000			
		3	Penyediaan tenaga pendukung kelancaran Operasional Kantor	1.000.000.000			
		<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>				
		1	Peningkatan Prasarana Gedung Tempat Kerja	300.000.000			
		<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
		1	Lomba Budaya dan Disiplin Kerja	25.000.000			
		<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
		1	Bimbingan Teknis/Workshop/Ssosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125.000.000			
		2	Undangan Pelaksanaan Study Banding/ Kunker, DII	100.000.000			
		<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000			
		2	Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	50.000.000			
		<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>				
1	Penyusunan Renstra, RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	150.000.000					
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>						
1	Peningkatan Sarana & Prasarana Laboratorium Lingkungan				2.500.000.000		
2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	300.000.000					
3	Peningkatan Masyarakat Zone Kawasan	10.000.000					
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.000.000					
5	Peningkatan Program Pewadahan & Pengumpulan Sampah	600.000.000					
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	100.000.000					
7	Peningkatan TPA dan TPS	1.500.000.000					
8	Pemeliharaan & Peningkatan Sarana Kebersihan & Pengelolaan Sampah	1.000.000.000					
9	Operasional UPTD Komposting	600.000.000					
10	Operasional FORJAMANSANA	40.000.000					
11	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan			500.000.000			
12	Study Master Plan Persampahan	50.000.000					
13	Replikasi pengolahan sampah terpadu			150.000.000			
14	Peningkatan Kerjasama pengolahan lingkungan dan pengembangan komposter			250.000.000			
15	Peningkatan informasi dan pendidikan lingkungan hidup			250.000.000			
16	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA				1.000.000.000		
17	Pemasangan paving area gedung lab lingkungan			95.000.000			

1	2	3	4	5	6
		<b>8 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>			
		1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	300.000.000		
		2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	150.000.000		
		3 Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan dan Pengembangan Komposter	150.000.000		
		4 Penyusunan Dokumen UKL-UPL	150.000.000		
		5 Kerjasama d Bidang Pengelolaan Lingkungan	150.000.000		
		6 Operasional Pemantauan Kualitas Air	150.000.000		
		7 Peningkatan Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup	175.000.000		
		8 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000		
		<b>9 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>			
		1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	200.000.000		
		2 Pengembangan sarana dan prasarana penerangan kota		1.500.000.000	
		3 Sarana dan prasarana TWSL		500.000.000	
		4 Peningkatan Taman Rekreasi		1.500.000.000	
		5 Peningkatan sarana dan prasarana pertamanan kota		750.000.000	
		6 Penataan Pemeliharaan Pengawasan dan pengendalian RTH			2.500.000.000
		7 Penanaman pohon sekitar sumber mata air senthong		750.000.000	
		8 Rehabilitas sumber mata air		900.000.000	
		<b>10 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>			
		1 Diseminasi ISO 9001	175.000.000		
		2 Operasional UPTD Pusat Informasi dan Study Lingkunag Hidup	400.000.000		
		3 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	100.000.000		
		4 Peningkatan Program Adiwiyata dan Adiwiyata BESTARI	150.000.000		
		5 Pendampingan Peningkatan Kerjasama/Kemitraan	130.000.000		
		6 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penerangan Kota		2.750.000.000	
		7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Kota	1.000.000.000		
		<b>11 Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>			
		1 Replikasi Pengolahan Sampah Terpadu	200.000.000		
		2 Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri	175.000.000		
		<b>12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>			
		1 Pemeliharaan dan Peningkatan Pertamanan dan Penghijauan Kota	750.000.000		
		2 Pemeliharaan RTH	750.000.000		
		3 Peningkatan Sarana Prasarana Pertamanan Kota	350.000.000		
		4 Peningkatan Taman Rekreasi		1.500.000.000	
		5 Sarana dan Prasarana Taman Wisata Studi Lingkungan		500.000.000	
		<b>13 Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah</b>			
		DED Sewerange Skala Kawasan			500.000.000
		2 DD IPAL Industri			500.000.000
		3 Pembungunan IPAL Komunal		75.000.000	1.000.000.000
		4 Pembangunan IPAL Industri			1.500.000.000
		<b>14 Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase</b>			
		1 Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan		500.000.000	

1	2	3	4	5	6	
10	Urusan Perumahan	2 Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan persampahan			1.000.000.000	
		3 Peningkatan TPA dan TPS			1.500.000.000	
		4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan persampahan		200.000.000		
		5 Pembangunan TPA sanitary landfill			8.750.000.000	
		<b>15 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>			300.000.000	3.000.000.000
		1 Pengembangan RTH TWSL			30.000.000	1.500.000.000
		2 Joging Track Kawasan Magrove (DED+Fisik)				
		1 Penyediaan Sarana Air Minum		15.950.000		159.500.000
		2 Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman				3.190.000.000
		3 Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving, Rabat, Aspal)				13.200.000.000
		4 Septictank Komunal + Jamban Keluarga				4.785.000.000
		5 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu				
		Pembangunan Pagar Rusunawa II		500.000.000		
		Pembangunan Pos Jaga Rusunawa II		60.000.000		
		Pemeliharaan Rusunawa		100.000.000		
		Pembangunan Ruang Komersial Rusunawa II		200.000.000		
		Pengurangan Kasiba/Lisiba Jl. Anggrek		350.000.000		
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni		200.000.000		
		<b>1 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan</b>				
		1 Penyusunan fungsi jalan kota Probolinggo				100.000.000
		2 Penyusunan status jalan Kota Probolinggo				100.000.000
		3 Normalisasi saluran & Trotoarisasi Jl Panglima Sudairman				1.100.000.000
		4 Normalisasi saluran&Trotoarisasi Jl Panglima Sudirman				1.000.000.000
		<b>2 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan</b>				
		Pembangunan jalan lingkungan (Paving,Rehab,Aspal )				13.200.000.000
		<b>3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>				
		1 Peningkatan jalan Panglima sudirman (Randu Pangger)				500.000
		2 Pembangunan jalan By pass (Ketapang - Pelabuhan)				200.000.000
		3 Pembangunan jalan akses keluar masuk pelabuhan Kota Probolinggo				200.000.000
		4 Pembangunan Frontage Road .				15.000.000
		<b>4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>				
		1 Kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai		10.700.000.000		
		2 Kegiatan pelaksanan normalisasi saluran sungai			7.000.000.000	
		3 Kegiatan Rahabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi				6.000.000.000
		4 Pembangunan saluran primer Jl Ir Sutami			900.000.000	
		5 Peningkatan saluran pakis I				200.000.000
		6 Peningkatan saluran pakis II				200.000.000
		7 Peningkatan saluran irigasi BKG IV				100.000.000
		8 Peningkatan saluran irigasi Bango				200.000.000
		<b>5 Program Pengembangan Perumahan</b>				
1 Pelaksanaan fisik RPKPP				3.000.000.000		
2 BSP2S ( Bantuan Triulan Pembangunan Perumahan swadaya				3.000.000.000		

1	2	3	4	5	6
		3 Stimulan PSU ( Program Sarana Utilitas )			6.600.000.000
		4 PLP2K - BK ( Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan )			5.000.000.000
		5 Pelaksanaan fisik strategis Sanitasi Kota			5.000.000.000
		6 Pelaksanaan fisik RPKPP			1.500.000.000
		7 Pembangunan Rusunawa			27.000.000.000
		8 PSD Banguna Resunawa			1.875.000.000
		<b>6 Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah</b>			
		Penyediaan Sarana Air Minum			1.595.000
		Pembuatan Sanimas			3.548.000.000
		Pemasangan Pipa baru ( Pengembangan Jaringan PDAM )			1.504.000.000
		Pembuatan rumah pompa, pengeboran sumber air & pemasangan		7.136.000.000	
		PAMSIMAS ( Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat			7.000.000.000
		Pembangunan SPAM			1.000.000.000
		<b>7 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>			1.800.000.000
		Pembangunan pagar kantor Kelurahan Pakistaji			300.000.000
		Pembangunan Kantor Penunjang Kecamatan Kanigaran			300.000.000
		Pembangunan Kantor Penunjang Kecamatan Kedopok			300.000.000
		Pembangunan Gedung&Ruang Pertemuan Kantor Bakesbanglinmas			400.000.000
		Pembangunan Kantor Kelurahan Jrebng Wetan			500.000.000
		<b>8 Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase</b>		700.000.000	10.887.000000
		Pembangunan Drainase lingkungan permukiman			5.690.000000
		Pembangunan drainase perkotaan			3.190.000.000
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prsarana dan sarana persampahan		500.000.000	2.137.000.000
		Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan persampahan			1.000.000.000
		Peningkatan TPA dan TPS			1.500.000.000
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan persampahan		200.000.000	
		Pembanguna TPA sanitary landfill			8.750.000.000
		<b>9 Program Perencanaan Tata Ruang</b>			3.993.000.000
		Bantuan Teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan			771.000.000
		Bantuan Teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan			661.000.000
		Bantuan Teknis Rencana Bangunan dan Lingkungan			761.000.000
		Penyusunan rencana tindak penatanaan dan revitalisasi kawasan mangrove			300.000.000
		PSD jogging track kawasan mangrove			1.500.000.000
		<b>10 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>			14.000.000.000
		Kegiatan Penanggulangan Banjir			14.000.000.000
		<b>11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			8.950.000.000
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedungkantor dan bangunan lainnya pendukung gedung kantor			3.050.000.000
		Pemabangunan gedung kantor/bangunan lainnya pendukung bangunan gedung kantor			5.900.000.000
1	<b>Misi 3</b> Urusan Perhubungan	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
		1 Penunjang Adminstrasi dan Operasional Rutin UPTD Parkir	15.000.000		

1	2	3	4	5	6
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.000.000		
		3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	92.400.000		
		4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.800.000		
		5 Penyediaan Alat Tulis kantor	80.000.000		
		6 Penyediaan Barang cetakan dan Peggandaan	425.000.000		
		7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	40.000.000		
		8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	27.300.000		
		9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	22.000.000		
		10 Penyediaan Makan dan Minuman	40.000.000		
		11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	200.000.000		
		12 Penyediaan Tenaga pendukung kelancaran Operasional Kantor	185.520.000		
		13 Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	17.800.000		
		14 Penunjang Adminstrasi dan Operasional Rutin kantor/ Kedinasan	102.180.000		
		15 Penunjang Adminstrasi dan Operasional Rutin UPTD Terminal	273.000.000		
		17 Penunjang Adminstrasi dan Operasional Rutin UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	110.000.000		
		18 Penunjang Adminstrasi dan Operasional Rutin UPTD Parkir	1.462.500.000		
		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Mebeleur	20.000.000		
		2 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	39.500.000		
		3 Pengadaan/ Pembangunan Taman	20.000.000		
		4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/ Operasional	120.000.000		
		5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat - Alat kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	30.000.000		
		6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman	30.000.000		
		7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan lainnya	50.000.000		
		<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50.400.000		
		2 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan/ Pakaian KORPRI/ pakaian Olahraga/ Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	45.000.000		
		3 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara hari - hari Besar Nasional	45.000.000		
		<b>4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
		1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	45.000.000		
		<b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
		1 Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penata Usahaan Keuangan SKPD	20.000.000		
		<b>6 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
		1 Perancangan, Penetapan dan Sertifikasi SMM ISO 9001-2000	50.000.000		
		<b>7 Program Peningkatan kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>			
		1 Penyusunan Renstra, RKPd dan Dokumen Perencanaan Lainnya	12.000.000		
		<b>8 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>			

1	2	3	4	5	6
		1 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	35.000.000		
		2 Sosialisasi/ Penyuluhan Perbengkelan	20.000.000		
		<b>9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>			
		1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	200.000.000		
		<b>10 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>			
		1 Kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/ Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang.	33.700.000		
		2 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	48.000.000		
		3 Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	22.165.000		
		4 Kegiatan pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	7.900.000		
		5 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	25.000.000		
		6 Operasional Pengawasan dan Ketertiban Transportasi Laut	20.000.000		
		7 Operasional Lebaran dan Tahun Baru	30.000.000		
		8 Pembuatan Dokumen Amdal Lalin	120.000.000		
		9 Operasional Forum Lalin Lintas	100.000.000		
		<b>11 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			
		1 Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	32.000.000		
			30.000.000		
		<b>12 Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan</b>			
		1 Pengembangan SDM dan Wahana Tata Nugraha	75.000.000		
		2 Pembinaan Kapal/ Perahu di Bawah 7 GT	25.000.000		
		3 Pengadaan Pos Pantau dan Management Lalulintas	100.000.000		
		<b>13 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas</b>			
		1 Pengadaan Rambu Lalu Lintas	322.382.500	500.000.000	
		2 Pengadaan Marka Jalan	402.420.000	250.000.000	
		3 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	150.000.000		
		4 Pengadaan Traffic Cone	50.000.000		
		5 Pengadaan Traffic dan Warning Light	719.147.500	200.000.000	
		6 Pengadaan Palang pintu KA	212.765.000	600.000.000	
		7 Pengadaan Shelter	100.000.000		
		8 Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	100.000.000		
		9 Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan	25.000.000		
		10 Pemeliharaan Marka jalan	727.765.000		
		11 Pengadaan Paku Jalan	100.000.000		
		12 Pengadaan Cermin Tikungan	125.000.000		
		13 Pengadaan Patok Reflektor	241.000.000		
		14 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light	353.940.000	150.000.000	
		15 Pemeliharaan Palang Pintu Lintasan Kereta Api	100.000.000		
		16 Pemeliharaan Shelter/Halte	110.000.000		
		17 Pengadaan Moving Sign	200.000.000		
		18 Pengadaan Zona Fasilitas Keselamatan Sekolah	200.000.000		
		19 Pemeliharaan Pos Pantau	60.000.000		
		20 Pemeliharaan Moving Sign	30.000.000		
		21 Pemeliharaan Patok Reflektor	25.000.000		
		22 Early Warning System		500.000.000	
		23 Pengadaan Underpass di lintasan KA masjid tuban		850.000.000	
		<b>14 Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi</b>			
		1 Pengolahan Data Elektronik	32.000.000		

1	2	3	4	5	6	
2	Urusan Pekerjaan Umum	15 <b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>				
		1 Pengembangan Kota Sehat	25.000.000			
		16				
		1 Pembangunan terminal kargo			30.000.000.000	
		2 Pembangunan pelabuhan kayu			2.000.000.000	
		3 Pembangunan pelabuhan penyeberangan (Probolinggo - Gili )			10.000.000.000	
		4 Pembuatan PJU tenaga surya			9.982.000.000	
		5 Pengembangan sarana dan prasarana penerangan kota			1.500.000.000	
			<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>			
		1 Penyusunan Fungsi Jalan Kota Probolinggo 2012	100.000.000			
		2 Penyusunan Status Jalan Kota Probolinggo 2012	100.000.000			
		3 Normalisasi Saluran & Trotoarisasi Jl.Panglima Sudirman	1.100.000.000			
		4 Normalisasi Saluran & Trotoarisasi Jl.Dr.Sutomo Sisi Timur	1.000.000.000			
		5 Peningkatan Jl. Anggrek	1.200.000.000			
		6 Peningkatan Jl. Lingkar Utara	3.000.000.000			
		7 Peningkatan Jl. Raden Wijaya	2.000.000.000			
		8 Pembuatan Jalan Tembus Sunan Muria - Sunan Ampel	660.000.000			
		9 Perbaikan Drainase & Jalan-Jalan Kota	2.000.000.000			
		10 Peningkatan Prasarana Wilayah Selatan	2.000.000.000			
		11 Pembangunan Jalan Tembus Wiroborang - Kedung Asem	3.300.000.000			
		12 Penataan Kawasan Gladak Serang	2.000.000.000			
		13 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				
		Pembangunan Sal. Jl. Barito	200.000.000			
		Pembangunan sal. Jl. Ki Hajar Dewantara	150.000.000			
		Pembangunan sal. Jl. Cokroaminoto	900.000.000			
		Pembangunan sal. Jl. Gubernur Suryo	200.000.000			
		Pembangunan Saluran Jl. Letjen Sutoyo	150.000.000			
		Pembangunan Sal. Bangsangan	150.000.000			
		Pembangunan Sal. Kali Pancor	200.000.000			
		Pembangunan Sal. Jl. Banda	200.000.000			
		Pembangunan Sal. Jl. Anggrek (Sumber Gentong)	150.000.000			
		Pembangunan Saluran Jl. Argopuro	200.000.000			
		Pembangunan Saluran Sumber Taman	150.000.000			
		Pembangunan Sal. Jl. KH Mustaqim	200.000.000			
		Pembangunan Sal. Jl. Kerinci	500.000.000			
		Pembangunan Saluran primer Jl. Ir. Sutami	200.000.000			
		Pembangunan Sal. Jl. Soekarno Hatta (Sumber Langse)	200.000.000			
		Pembangunan Saluran Jl. Brantas	150.000.000			
		Pembangunan Saluran Irigasi Jl. Indra Giri	200.000.000			
		Pembangunan Saluran Pembuang Gladak Serang	300.000.000			
		Pembangunan Sal. Jl. Lumajang ( Kedung Asem )	150.000.000			
Pembangunan saluran Pakis I	150.000.000					
Pembangunan saluran Pakis II	150.000.000					
Pembangunan saluran Pakis III	200.000.000					
Pembangunan Saluran Lontong kanan	150.000.000					
14 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi						
Peningkatan Sal. Irigasi Legundi I	300.000.000					
Peningkatan Sal. Irigasi Legundi II	150.000.000					
Peningkatan Sal. Irigasi Legundi III	150.000.000					
Peningkatan Sal. Irigasi Legundi IV	200.000.000					
Peningkatan Saluran Irigasi Wringin I	200.000.000					
Peningkatan Saluran Irigasi Wringin II	150.000.000					

1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Saluran Irigasi Belo'an II	200.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Essan II	150.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Essan III	200.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Essan IV	150.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Kali Kasbah	300.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Kali Umbul	150.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Randu	200.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Kedung Kemiri	200.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Sukun	200.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Sumber Ardi	150.000.000		
		Peningkatan Sal. Irigasi Gladak Serang Kanan	150.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Umbut	250.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Asem Doyong	200.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi BKG I	150.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi BKG III	200.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi BKG IV tengah	200.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi BKG IV kiri	150.000.000		
		Peningkatan Saluran Irigasi Bango	150.000.000		
	15	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali			
		Normalisasi Saluran Timur STIA Bayuangga	150.000.000		
		Normalisasi Saluran Jl. Sunan Muria	200.000.000		
		Normalisasi Saluran Jl. Porong	150.000.000		
		Normalisasi Saluran Jl. Ir. Sutami	200.000.000		
		Normalisasi Saluran Jl. Walikota Gatot	150.000.000		
		Normalisasi Saluran Jl. Maramis (Perum Asabri)	150.000.000		
		Normalisasi Saluran Jl. A. Yani - Basuki Rahmat	150.000.000		
		Normalisasi Saluran Kel. Kademangan	150.000.000		
		Normalisasi Saluran Jl. Anggrek	350.000.000		
		Normalisasi Saluran Timur Perum Gabriella	200.000.000		
	16	Pemeliharaan Tugu Batas Kota ( Ketapang )	52.500.000		
	17	Pemeliharaan Tugu Batas Kota ( Wiroborang)	52.500.000		
	18	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000		
	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor dan Bangunan			
		Lainnya Pendukung Gedung Kantor			
		Rehab Rumah Potong Hewan	100.000.000		
		Rehab Gudang Aset dan Perlengkapan	200.000.000		
		Rehab Kantor Bagian Pembangunan	300.000.000		
		Rehab Kantor Badan Lingkungan Hidup	200.000.000		
		Rehab Kantor Arsip	100.000.000		
		Rehab Kantor Kel. Kedung Galeng	200.000.000		
		Rehab Kantor Kel. Kedung Asem	150.000.000		
		Rehab Kantor Kel. Kebonsari Kulon (lanjutan)	200.000.000		
		Rehab Kantor Kel. Jati	200.000.000		
		Rehab Kantor Kel. Wiroborang	100.000.000		
		Rehab Kantor Kel. Triwung Lor	150.000.000		
		Rehab Kantor Kec. Kademangan	150.000.000		
		Rehab Kantor Kel. Kareng Lor	100.000.000		
		Rehab Aloon-Aloon	400.000.000		
		Rehab Tiang Bendera Kantor Pemkot	100.000.000		
	20	Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Pendukung			
		Bangunan Gedung Kantor			
		Pembangunan Pagar Kantor Kel. Pakistaji			300.000.000
		Pembangunan Kantor Penunjang Kec. Kanigaran			300.000.000
		Pembangunan Kantor Penunjang Kec. Kedopok			300.000.000
		Pemb Gud & Ruang Pertemuan Kantor Bakesbanglinmas			400.000.000
		Pembangunan Kantor Kel. Jrebeng Wetan			500.000.000
		Pembangunan Gedung Banger Tele Centre			400.000.000
		Pembangunan Perpustakaan			1.000.000.000

1	2	3	4	5	6
		Pembangunan Kantor DPD KNPI			200.000.000
		Pembangunan Gedung Serbaguna (multiyears)	2.500.000.000		
		21 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana OR			
		Pembangunan Tribun Stadion Bayuangga	800.000.000		
		Pembangunan Tribun GOR Mastrip	800.000.000		
3	Urusan Perencanaan Pembangunan	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
		1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000		
		2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	80.000.000		
		3 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	10.000.000		
		4 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	360.500.000		
		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	358.500.000		
		2 Pengadaan/Pembangunan Taman	50.000.000		
		3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor	42.800.000		
		4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional	70.000.000		
		5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	20.000.000		
		6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	20.000.000		
		<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
		1 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja	15.000.000		
		<b>4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
		1 Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000		
		2 Pelaksanaan Studi Banding/Kunjungan Kerja/dll	100.000.000		
		3 Training Management (Outbond)	100.000.000		
		<b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
		1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000		
		2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000		
		3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000		
		4 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	7.000.000		
		5 Penyusunan DPA SKPD	10.000.000		
		<b>6 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>			
		1 Penyusunan Renstra, RKPD, dan Dokumen Perencanaan Lainnya	7.500.000		
		2 Profil Unit Kerja dan Publikasi Hasil Pembangunan	125.000.000		
		3 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja			
		4 Analisis Kebutuhan Barang			
		<b>7 Program Kerjasama Pembangunan</b>			
		1 Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah, Propinsi, Pusat, Luar Negeri dan Dengan Pihak Swasta	417.700.000		

1	2	3	4	5	6
		<b>8 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			
		1 Morning On Panglima Sudirman Street (MPS2)	36.500.000		
		<b>9 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
		1 Penyusunan Kebijakan Umum APBD	110.000.000		
		<b>10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
		1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi, dan Pusat	180.000.000		
		2 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	30.000.000		
		3 Penyusunan RKPD	20.000.000		
		4 Pekan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000		
		5 Sosialisasi RPJMD 2010-2014	45.000.000		
		6 Optimalisasi Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	20.000.000		
		7 Penyusunan Nomenklatur Program	50.000.000		
		1 Pendampingan implementasi Program Sanitasi Kota Probolinggo	100.000.000		
		2 Perencanaan dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2010 - 2014	100.000.000		300.000.000
		3 Rencana Induk Kawasan Industri	115.000.000		
		4 Simpul Jaringan Data Spasial Daerah	75.000.000		
		5 Evaluasi verifikasi dan Pemantauan Hasil Kegiatan Infrastruktur Operasional LPM se Kota Probolinggo	100.000.000		
		6 Studi Kelayakan Investasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota Probolinggo	100.000.000		
		7 Masterplan Penataan Mata Air Kota Probolinggo	110.000.000		
		8 Pengembangan Sarana – Prasarana & Infrastruktur Pendukung Kawasan Minapolitan	100.000.000		
		9 Penataan Kawasan Pusat Informasi Wisata dan Dekranas (Dewan Kerajinan Nasional)	100.000.000		
		10 Studi Kelayakan Gedung Serba Guna	100.000.000		
		<b>11 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>			
		1 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Lingkup Bidang Ekonomi	90.000.000		
		2 Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	90.000.000		
		3 Fasilitasi Tim Kaji Terap pertanian Organik	85.000.000		
		4 Analisa Perkembangan Ekonomi Kota Probolinggo dan Penyusunan PDRB Kecamatan	175.000.000		
		5 Pemetaan Sektor strategis percepatan pertumbuhan Ekonomi	60.000.000		
		6 Peningkatan Manajemen Investasi	100.000.000		
		7 Review Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan	95.000.000		
		8 Penyusunan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	100.000.000		
		9 Studi Kelayakan pengembangan Kawasan Sentra Sapi PO	95.000.000		
		10 Strategi Pemasaran dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	95.000.000		
		11 SIM PK	100.000.000		

1	2	3	4	5	6
		<b>12 Program Perencanaan Sosial Budaya</b>			
		1 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	100.000.000		
		2 Peningkatan Capaian Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs)	135.000.000		
		3 Peningkatan Corporate Social Responsibility (CSR)	50.000.000		
		4 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100.000.000		
		5 Masterplan Pendidikan	100.000.000		
		6 Evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)	100.000.000		
		7 Penyusunan Masterplan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium / MDGs	100.000.000		
		8 Kajian tingkat kebahagiaan masyarakat Kota Probolinggo	100.000.000		
		9 kajian tentang distribusi dan sumber daya pembangunan yang berkeadilan	100.000.000		
		<b>13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>			
		1 Perencanaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Kota Probolinggo Sehat	182.000.000		
		<b>14 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>			
		1 Penyusunan Informasi Ketenagakerjaan Daerah	80.000.000		
		<b>15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>			
		1 Perencanaan Pengembangan Museum serta Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya	97.500.000		
		2 Kajian Identifikasi Budaya Pandalungan di Kota Probolinggo	90.000.000		
		<b>16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>			
		1 Strategi Pembinaan Pemuda Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pemuda	95.000.000		
		2 Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	100.000.000		
		<b>17 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>			
		1 kajian Optimalisasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100.000.000		
		2 Kajian Pendidikan bagi Penanganan Anak-anak Tuna Laras	95.000.000		
		<b>18 Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			
		1 Kajian Optimalisasi Penanganan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Melalui Jamkesmas/Jamkesda	100.000.000		
		<b>19 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>			
		1 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100.000.000		
		2 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	150.000.000		
		3 Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan	150.000.000		
		4 Feasibility Study Pemekaran Wilayah Kelurahan	100.000.000		
		5 Kajian Pengembangan kapasitas kelembagaan kelurahan menjadi SKPD	100.000.000		
		<b>20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>			
		1 Fasilitas Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan partisipatif	150.000.000		

1	2	3	4	5	6
		<p>21 <b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b></p> <p>1 Evaluasi tentang pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan 100.000.000</p> <p>2 Perencanaan Probolinggo sebagai Kota layak Anak 100.000.000</p> <p>22 <b>Program Pengembangan Data/Informasi</b></p> <p>1 Penyusunan Data Statistik Daerah 75.000.000</p> <p>2 Penjaringan Data Hasil Pembangunan 50.000.000</p> <p>3 Operasional Jaringan (LAN dan WAN) 300.000.000</p> <p>4 Publikasi Perencanaan dan Hasil Pembangunan 150.000.000</p> <p>5 Kampung Cyber 100.000.000</p> <p>6 Koordinasi dan Sinkronisasi Litbang 50.000.000</p> <p>7 Updating SILAGO 50.000.000</p> <p>8 Pengelolaan Website 50.000.000</p> <p>9 Penyusunan data base gallery Kota Probolinggo 50.000.000</p> <p>23 <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b></p> <p>1 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 100.000.000</p> <p>2 Kontrak kinerja SKPD 75.000.000</p> <p>3 Revisi RPJPD 2006-2020 75.000.000</p> <p>4 Bimbingan teknis Penyusunan RPJM kelurahan 75.000.000</p> <p>5 Identifikasi Pengembangan Pembangunan Daerah 100.000.000</p> <p>6 Good governance award 100.000.000</p> <p>7 Evaluasi RKPD Tahun 2011 75.000.000</p> <p>8 Evaluasi Sasaran Tahunan RPJMD 75.000.000</p> <p>24 <b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b></p> <p>1 Studi evaluasi implementasi peraturan-peraturan daerah Kota Probolinggo 75.000.000</p> <p>2 Kajian dampak kebijakan bantuan langsung masy. 100.000.000</p> <p>25 <b>Program Perenc.Prasarana Wilayah &amp; SDA</b></p> <p>1 Study Potensi Pemanfaatan Angin Gending Sebagai Energi Alternatif 100.000.000</p> <p>2 Kajian Peningkatan Pupuk Organik menjadi Granule 100.000.000</p>			
4	Urusan Penataan Ruang	<p>1 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) 500.000.000</p> <p>2 Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 100.000.000</p> <p>3 Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir 125.000.000</p> <p>4 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 125.000.000</p> <p>5 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan</p> <p>6 Penyusunan RTRK Kel Kanigaran 80.000.000</p> <p>7 Penyusunan RTRK Kel Kedopok 80.000.000</p> <p>8 Penyusunan RTRK Kel Triwung Lor 80.000.000</p> <p>9 Survey &amp; Pemetaan 80.000.000</p> <p>10 Penyusunan Pemetaan Kawasan Perumahan &amp; Permukiman 80.000.000</p> <p>11 Monitoring Evaluasi &amp; Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang 80.000.000</p> <p>12 Penyus Pemetaan Kawasan Terbangun &amp; Tidak Terbangun 80.000.000</p>			
5	Urusan Penanaman Modal Daerah	<p>1 Program Peningkatan Pengembangan Sarana Perekonomian</p> <p>1 Pemantauan,perkembangan sarana perekonomian dan peningkatan produksi komoditi daerah 67,500,000,00</p>			

1	2	3	4	5	6
		2 Koordinasi Dalam Peningkatan Sarana Perekonomian	15.000.000,00		
		3 Monitoring, evaluasi serta pelaporan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau			418.932.590,00
		4 Penyusunan pedoman/petunjuk pengembangan sarana perekonomian, peningkatan produksi dan penanaman modal	35.000.000,00		
		2 Program Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan UMKM			
		Promosi Potensi-potensi Daerah dalam rangka Meningkatkan Investasi dan Daya tarik Penanaman Modal	350.000.000,00		
		Pembuatan Profil Investasi	45.000.000,00		
		3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
		1 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		65.000.000,00	
		2 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		25.000.000,00	
		3 Monitoring, evaluasi, pelaporan data perekonomian dan penanaman modal		25.200.000,00	
		4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
		1 Pengadaan Alat kantor, alat rumah tangga, computer, dll	35.000.000,00		
		2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dan kendaraan dinas/operasional	15.000.000,00		
		3 Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor, alat rumah tangga dan computer	12.000.000,00		
		4 Pemeliharaan rutin/berkala taman	16.000.000,00		
		5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
		1 Pengadaan pakaian kerja lapangan/KORPRI/Pakaian olah raga/Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	11.200.000,00		
		2 Penyelenggaraan peringatan dan upacara Hari-hari Besar Nasional	40.000.000,00		
		3 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja	7.500.000,00		
		6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Ekonomi Kecil Menengah			
		1 Fasilitasi pengembangan sarana promosi d hasil produksi	45.000.000,00		
		7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
		1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar Kinerja	4.000.000,00		
		2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	6.200.000,01		
		3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.000.000,00		
		4 Penyusunan RKA dan RAPBD	4.000.000,00		
		5 Penyusunan Renstra	4.000.000,00		
		6 Penyusunan KUA PPAS	4.000.000,00		
		8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
		1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	85.000.000,00		
		2 Penunjang Administrasi Operasional Rutin/Kantor	160.000.000,00		
		9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
		1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000,00		
		2 Pelaksanaan Study Banding	90.000.000,00		

1	2	3	4	5	6
		10 Program Pengembangan Sarana Perekonomian			
		1 Sosialisasi dukungan penyediaan permodalan	17,500,000,00	-	-
		<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
		1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	-	-
		2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	75.000.000	-	-
		3 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	25.680.000	-	-
		4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	65.000.000	-	-
		5 Penyediaan Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan	414.070.000	-	-
		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	15.000.000	-	-
		2 Pengadaan Mebeleur	70.000.000	-	-
		3 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	45.000.000	-	-
		4 Pengadaan/Pembangunan Taman	15.000.000	-	-
		5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan bangunan lainnya pendukung kantor	70.000.000	-	-
		6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dan kendaraan dinas / operasional	65.000.000	-	-
		7 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	5.000.000	-	-
		8 Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	16.450.000	-	-
		9 Pemeliharaan rutin/berkala Taman	10.000.000	-	-
		<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	22.000.000	-	-
		2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/ Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	12.000.000	-	-
		<b>4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
		1 Bimbingan Teknis/Workshop/ Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	-	-
		2 Pelaksanaan Studi Banding/Kunjungan Kerja/dll	60.000.000	-	-
		<b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
		1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.500.000	-	-
		2 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	11.000.000	-	-
		<b>6 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
		1 Perancangan, Penetapan dan Sertifikasi SMM ISO 9001-2000	45.000.000	-	-
		2 Perencanaan, Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	25.000.000	-	-
		3 Penyusunan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	22.500.000	-	-
		4 Evaluasi dan Pengendalian Perijinan	75.000.000	-	-
		5 Perancangan, Pembinaan dan Penilaian Citra Pelayanan Prima (CPP)	20.000.000	-	-
		<b>7 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>			
		1 Training Manajemen	55.000.000	-	-
		2 Pengembangan Budaya Kerja	17.000.000	-	-

1	2	3	4	5	6
6	Urusan Komunikasi dan Informatika	<b>8 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>			
		1 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Investasi dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	30.000.000	-	-
		2 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	35.000.000	-	-
		3 Penyelenggaraan Pameran Investasi	105.000.000	-	-
		4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	35.000.000	-	-
		5 Operasional Penertiban Perijinan	35.000.000	-	-
		6 Penyediaan Media Penyeberluasan Informasi Perjinan	125.000.000	-	-
		7 Sosialisasi Peraturan Daerah di bidang perijinan	40.000.000	-	-
		<b>9 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>			
		1 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	30.000.000	-	-
		<b>10 Program Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan UKM</b>			
		1 Pembuatan Profil Investasi	25.000.000	-	-
		2 Sosialisasi dan Pembinaan Perkuatan Modal Sendiri bagi Pelaku UMKM	42.000.000	-	-
		<b>11 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			
		1 Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional (PHBN)	56.000.000	-	-
		2 Morning on Panglima Sudirman Street (MPS2)	20.000.000	-	-
		<b>12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>			
		1 Pengembangan Kota Sehat	15.000.000	-	-
		<b>1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>			
		1 Penerbitan Tabloid Daerah	150.000.000,00	-	-
		2 Pengolahan Komunikasi Radio	250.000.000,00	-	-
		3 Operasional Jaringan LAN dan Website	50.000.000,00	-	-
		<b>2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			
		1 Morning on Panglima Sudirman Street (MPS2)	20.00.0000,00	-	-
		<b>3 Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi</b>			
		1 Pengelolaan Kliping Berita dan Kepustakaan Kehumasan	15.000.000,00	-	-
		2 Peliputan dan Dokumentasi Materi Kegiatan Pemerintah Daerah	12.000.000,00	-	-
<b>4 Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa</b>					
1 Pemuatan Advetorial, Sponsor, Artikel, dan Rubrik Khusus Di Media	450.000.000,00	-	-		
2 Forum Kemitraan Dengan Wartawan Kota Probolinggo	60.000.000,00	-	-		
<b>5 Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik</b>					
1 Sosialisasi Kebijakan Melalui Media Luar Ruang (Running Teks, Spanduk, Baliho, Banner dll)	150.000.000,00	-	-		
2 Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik	237.800.000,00	-	-		
3 Pelayanan Informasi Melalui Pengadaan dan Pengelolaan Papan Informasi	40.000.000,00	-	-		
4 Pelayanan Informasi Melalui penerbitan Media Tercetak (Leaflet, Poster, Kalender Dll)	125.000.000,00	-	-		

1	2	3	4	5	6
1	Misi 4 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Peran Serta Pemerintah Daerah Dalam Pekan KIM Jawa Timur 80.000.000,00</li> <li>6 Penyebarluasan Informasi Melalui Unit Mobil Siaran Keliling 8.000.000,00</li> <li>6 <b>Program Peningkatan Pelayanan Persandian</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengelolaan Pengamanan dan Pengiriman Materi Pesandian 12.500.000,00</li> <li>2 Operasional Petugas Persandian 30.000.000,00</li> </ul> </li> <li>1 <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40.000.000</li> <li>3 Rakor dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150.000.000</li> <li>4 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor 35.000.000</li> <li>5 Penunjang Administrasi Rutin Kantor / Dinas 420.000.000</li> </ul> </li> <li>2 <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengadaan Mebelair 35.000.000</li> <li>3 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga &amp; Komputer 85.000.000</li> <li>4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PDK Gedung Kantor 35.000.000</li> <li>5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman 50.000.000</li> <li>6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kantor 74.000.000</li> </ul> </li> <li>3 <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan / Pakaian Korpri / Pakaian Olah Raga / Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 50.000.000</li> <li>2 Pelaksanaan Upacara Bendera 95.000.000</li> </ul> </li> <li>4 <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pelaksanaan Studi Banding 85.000.000</li> </ul> </li> <li>5 <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Penyusunan Laporan Kinerja Lakip dan Ikhtisar Realisasi SKPD 30.000.000</li> </ul> </li> <li>6 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Kelompok Budaya Kerja 22.000.000</li> <li>2 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal</li> <li>3 Pendataan Orang Asing dan Keegiatannya 35.000.000</li> </ul> </li> <li>7 <b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pembinaan Korsik Pemkot Probolinggo Sebagai Ikon Pemerintah Kota Probolinggo yang Profesional 475.000.000</li> <li>2 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka 200.000.000</li> <li>3 Seminar, Talk Show, Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan 200.000.000</li> <li>4 PHBN 150.000.000</li> <li>5 Forum Pembauran Kebangsaan 50.000.000</li> </ul> </li> <li>8 <b>Program Pembangunan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Peringatan HUT Linmas 75.000.000</li> <li>2 Pembuatan Kartu tanda Anggota Linmas 50.000.000</li> </ul> </li> </ul>			

1	2	3	4	5	6
		3 Pembangunan Terpadu Linmas, Polmas, Babinsa	58.000.000		
		4 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	200.000.000		
		5 Percontohan Kampung Terpadu	150.000.000		
		6 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			
		7 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan	60.000.000		
		<b>9 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</b>			
		1 Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras	75.000.000		
		2 Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional	150.000.000		
		3 Operasi Yustisi Peredaran Minuman Keras	32.500.000		
		<b>10 Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>			
		1 Pendataan Pembangunan Peningkatan Peran LSM dan Ormas	100.000.000		
		2 KOMINDA	100.000.000		
		<b>11 Program Penataan Hubungan Pemerintah &amp; Masyarakat</b>			
		1 FKUB	50.000.000		
		<b>12 Program RANHAM</b>			
		1 Kegiatan Koordinasi Inventarisasi Penyusunan Kegiatan Pelaksanaan Prioritas RANHAM	50.000.000		
		2 Sosialisasi & Pendidikan HAM	75.000.000		
		<b>13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
		1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	-	-
		2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.000.000	-	-
		3 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	363.000.000	-	-
		4 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	300.000.000	-	-
		5 Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	-	-
		6 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	3.000.000	-	-
		7 Penyusunan DPA	3.000.000	-	-
		8 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	400.000.000	-	-
		9 Pengadaan Mebeleur	15.000.000	-	-
		10 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	35.000.000	-	-
		11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	5.000.000	-	-
		12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Bangunan & Pendukung Gedung Kantor Lainnya	50.000.000	-	-
		13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan & Kendaraan Dinas Operasional	70.000.000	-	-
		14 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian KORPRI/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	25.000.000	-	-
		15 Penyelenggaraan Peningkatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	35.000.000	-	-
		16 Pelaksanaan Study Banding/Kunjungan Kerja/dll	40.000.000	-	-
		17 Pelatihan Kesamaptaan	45.000.000	-	-
		18 Pengadaan Taman	30.000.000	-	-
		19 Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	-	-
		20 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	6.000.000	-	-

1	2	3	4	5	6
		21 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Personil Sat Pol PP	20.000.000	-	-
		22 Penyusunan Profil SKPD	3.000.000	-	-
		23 Training Manajemen	100.000.000	-	-
		24 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja	15.000.000	-	-
		25 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	110.000.000	-	-
		26 Pelaksanaan HUT Sat Pol PP	60.000.000	-	-
		27 Pelaksanaan Jambore Sat Pol PP	50.000.000	-	-
		28 Operasi Penegakan Disiplin Pegawai	45.000.000	-	-
		29 Penertiban Penjualan MIRAS	30.000.000	-	-
		30 Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	45.000.000	-	-
		31 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	45.000.000	-	-
		32 Pembinaan bagi para Pengusaha se-Wilayah Kota Probolinggo	15.000.000	-	-
		33 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Keamanan	45.000.000	-	-
		34 Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Sat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	25.000.000	-	-
		35 Monitoring Tim Pantau Reklame	30.000.000	-	-
		36 Penertiban Ijin Bangunan	45.000.000	-	-
		37 Penertiban Ijin Usaha Hiburan	45.000.000	-	-
		38 Pembinaan PPNS	20.000.000	-	-
		39 Pembinaan Penyelenggaraan Trantibum serta Penegakan PERDA	15.000.000	-	-
		40 Penertiban Ijin Reklame	45.000.000	-	-
		41 Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan PERDA	30.000.000	-	-
		42 Pengendalian Keamanan Lingkungan	45.000.000	-	-
		43 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	45.000.000	-	-
		44 Penertiban Lokasi PSK Liar	25.000.000	-	-
		45 Operasi Gabungan dalam Penertiban PSK dan Waria	35.000.000	-	-
		46 Operasional Pengendalian Keamanan	45.000.000	-	-
2	Urusan Pemerintahan Umum	1 <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.115.254.750		
		2 <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.957.800.000		
		3 <b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	1.485.597.000		
		4 <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	10.000.000		
		5 <b>Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik</b>	7.600.000		
		6 <b>Program Peningkatan Kapasitas kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	94.400.000		
		7 <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	1.265.700.000		
		8 <b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	75.000.000		
		9 <b>Program Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan</b>	70.450.000		
		10 <b>Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan</b>			
		1 Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Acara Kepala Daerah	60.000.000,00		

1	2	3	4	5	6
		2 Operasional Penyiapan Bahan Acara, Pengaturan Tempat dan Sarana Kegiatan Pimpinan dan Kepala Daerah	45.000.000,00		
		<b>1 Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
		1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	421.750.000	-	-
		2 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	337.740.000	-	-
		3 Program Peningkatan Administrasi dan Operasional Rutin / Kedinasan	10.310.070.500	-	-
		4 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	15.000.000	-	-
		<b>2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2.409.000.000	-	-
		2 Pengadaan / Pembangunan Taman	25.000.000	-	-
		3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor	20.740.000	-	-
		4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/ Operasional	231.000.000	-	-
		5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman	30.500.000	-	-
		<b>3 Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	208.250.000	-	-
		2 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	64.500.000	-	-
		<b>4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
		1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	170.000.000	-	-
		2 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	382.615.000	-	-
		3 Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gaji	187.500.000	-	-
		4 Evaluasi Penerimaan & Pengeluaran Kas Daerah	187.500.000	-	-
		5 Penyusunan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	220.300.000	-	-
		<b>5 Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur</b>			
		1 Training Manajemen	184.000.000	-	-
		<b>6 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
		1 Penyusunan Standar Satuan Harga	168.000.000	-	-
		2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	362.400.000	-	-
		3 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	192.500.000	-	-
		4 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	440.000.000	-	-
		5 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Anggaran Kinerja	155.750.000	-	-
		6 Aplikasi PPH, PPN dan Astek Kas Daerah	148.859.700	-	-
		7 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Pelaksanaan APBD	339.625.000	-	-
		<b>7 Peningkatan Penerimaan Daerah</b>			
		1 Intensifikasi Kinerja Administrasi Keuangan Daerah	666.000.000	-	-
		2 Penyusunan dan Evaluasi Pendapatan daerah	202.000.000	-	-
		3 Intensifikasi dan Evaluasi Pajak Daerah	331.080.000	-	-
		4 Pendataan dan Optimalisasi Retribusi Daerah	303.000.000	-	-
		5 Sosialisasi Rekonsiliasi dan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	428.520.000	-	-

1	2	3	4	5	6
		6 Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Retribusi UPTD Pasar Baru	435.475.000	-	-
		7 Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Retribusi UPTD Pasar Wonoasih	361.251.500	-	-
		8 Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Retribusi UPTD Pasar Wonoasih	395.000.000	-	-
		9 Sosialisasi & Evaluasi BPHTB	360.400.000	-	-
		10 Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan RUSUNAWA	275.000.000	-	-
		<b>8 Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah</b>			
		1 Peningkatan pengembangan dan Pelayanan Kas Daerah	268.386.630	-	-
		2 Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah	778.035.000	-	-
		3 Evaluasi atas Pelaksanaan Desentralisasi Penatausahaan Keuangan Daerah	265.000.000	-	-
		4 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Implementasi Sistem Aplikasi Penyusunan APBD	389.880.000	-	-
		5 Monitoring Penerimaan & Pengeluaran Kas Daerah	108.800.000	-	-
		<b>9 Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah</b>			
		1 Pengadaan Tanda Batas Tanah Aset	122.000.000	-	-
		2 Pengadaan Tanah Aset Daerah	7.591.000.000	-	-
		3 Asuransi aset	826.680.000	-	-
		4 Sertifikat Aset	378.924.000	-	-
		<b>11 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			
		1 Promosi Produk Unggulan Pasar Daerah	59.500.000	-	-
		2 Pentas Seni Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	47.000.000	-	-
		<b>12 Pengembangan Lingkungan Sehat</b>			
		1 Pengembangan Kota Sehat	86.000.000	-	-
		<b>1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH</b>			
		1 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	400.000.000	-	-
		<b>2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>			
		1 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	150.000.000	-	-
		<b>3 Program Penataan Peraturan Perundang - undangan</b>			
		1 Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan	350.000.000	-	-
		2 Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	250.000.000	-	-
		3 Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang - undangan	125.000.000	-	-
		4 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang - undangan	125.000.000	-	-
		<b>4 Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum</b>			
		1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Aparatur di bidang Hukum dan HAM	50.000.000	-	-
		<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
		1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000	-	-
		2 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	115.000.000	-	-

1	2	3	4	5	6
		<p><b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <p>1 Pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, komputer, dll 50.000.000</p> <p>2 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dan bangunan lainnya pendukung gedung 15.000.000</p> <p>3 Pemeliharaan rutin/berkala taman 27.000.000</p> <p><b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b></p> <p>1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 10.000.000</p> <p>2 pengadaan pakaian kerja lapangan/Korpri/Pakaian Olahraga/Pakaian Khusus hari-hari tertentu 20.000.000</p> <p><b>4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b></p> <p>1 Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional (PHBN) 18.000.000</p> <p>2 Morning on Panglima Sudirman Street (MPS2) 20.000.000</p> <p><b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b></p> <p>1 Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi Seminar Implementasi Peraturan Perundang-undangan 25.000.000</p> <p>2 Pelaksanaan studi banding/Kunjungan Kerja 55.000.000</p> <p>3 Penyelenggaraan Training Management 150.000.000</p> <p><b>6 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik</b></p> <p>1 Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Publik 237.750.000</p> <p>2 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 100.000.000</p> <p><b>7 Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b></p> <p>1 Penyediaan Kartu Tanda Pengenal PNS dan Tenaga Kontrak 38.000.000</p> <p>2 Analisis jabatan dan Standar Kompetensi 150.000.000</p> <p>3 Pembinaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 85.000.000</p> <p>4 Pengembangan Budaya Kerja 135.000.000</p> <p>5 Penyusunan Profil SKPD 22.500.000</p> <p><b>8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b></p> <p>1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 85.000.000</p> <p>2 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 99.075.000</p> <p>3 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD 5.000.000</p> <p><b>9 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b></p> <p>1 Evaluasi dan Desain Kelembagaan 85.000.000</p> <p>2 Pemetaan Jabatan Fungsional Umum dan Khusus 89.330.000</p>			
3		<p><b>1 Program Pelayanan Administrasi</b></p> <p>1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Negeri 50.000.000</p> <p>2 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan 155.000.000</p> <p><b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <p>1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer, dll 50.000.000</p> <p>2 Pengadaan/ Pembangunan Taman 30.000.000</p>			

1	2	3	4	5	6		
3	Urusan Kepegawaian	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor	15.000.000			
		4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional	22.000.000			
		5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat rumah Tangga, Komputer	20.000.000			
		6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	10.000.000			
			<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
		1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olahraga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	12.500.000			
		2	Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari besar Nasional	35.000.000			
		3	Lomba Budaya dan Disiplin Kerja	10.000.000			
			<b>4 Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>				
		1	Pendidikan dan pelatihan formal	70.000.000			
		2	Bimbingan Teknis/ Workshop/Sosialisasi/ Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000			
		3	Pelaksanaan Study Banding/Kunjungan Kerja	50.000.000			
			<b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
		1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	13.000.000			
		2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.000.000			
		3	Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	13.000.000			
			<b>6 Program Pengembangan Data/Informasi</b>				
		1	Penjaringan Data Hasil Pembangunan (Monitoring dan Evaluasi)	100.000.000			
			<b>7 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>				
		1	Penyusunan Profil SKPD	5.000.000			
			<b>8 Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>				
		1	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	500.000.000			
			<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
		1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.000.000		-	-
		2	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	240.000.000		-	-
			<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
		1	Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer, dll	46.000.000		-	-
		2	Pengadaan / Pembangunan Taman	13.500.000		-	-
		3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor	28.000.000		-	-
		4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas / Operasional	41.475.000		-	-
		5	Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	25.789.000		-	-
		6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman	18.000.000		-	-
			<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	4.000.000		-	-		
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/ Pakaian Olah Raga/ Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	32.375.000		-	-		
3	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari besar Nasional	25.000.000		-	-		

1	2	3	4	5	6
		<b>4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		-	-
		1 Bimbingan Teknis/Workshop/ Sosialisasi/ Seminar Implementasi Peraturan Perundang-undangan	105.260.000	-	-
		2 Pelaksanaan studi banding / Kunjungan Kerja/ dll	100.000.000	-	-
		<b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		-	-
		1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.100.000	-	-
		2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	9.100.000	-	-
		3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.400.000	-	-
		4 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	11.200.000	-	-
		5 Penyusunan DPA SKPD	1.550.000	-	-
		<b>6 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>		-	-
		1 Pengembangan Budaya Kerja	4.000.000	-	-
		2 Penyusunan Profile SKPD	10.000.000	-	-
		<b>7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		-	-
		1 Morning on Panglima Sudirman Street (MPS2)	16.000.000	-	-
		<b>8 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		-	-
		1 Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	21.000.000	-	-
		<b>9 Program Peningkatan, Penjejan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		-	-
		1 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah	50.000.000	-	-
		2 Psikotest Bagi Calon Pejabat Struktural dan Fungsional	70.000.000	-	-
		<b>10 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		-	-
		1 Seleksi Penerimaan CPNS	650.000.000	-	-
		2 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	45.290.000	-	-
		3 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	70.000.000	-	-
		4 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	52.550.000	-	-
		5 Proses penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	99.202.500	-	-
		6 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	20.000.000	-	-
		7 Pemberian bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	40.000.000	-	-
		8 Laporan Peremajaan Data	50.560.000	-	-
		9 Sumpah PNS, Pembinaan CPNS	127.807.500	-	-
		10 Pengurusan ASKEM, ASKES, Taperum, Karis, Karsu dan Tunjangan Keluarga	34.979.000	-	-
		11 Pembuatan DP3, Buku Himpunan Model DK	33.815.000	-	-
		12 Penerbitan SK CPNS, SK PNS, Pangkat, PMK, Gaji Berkala dan Cuti PNS Fungsional	175.000.000	-	-
		13 Pengurusan Taspen, Karpeg, dan Pensiun PNS Fungsional	100.000.000	-	-
		14 Mutasi PNS Fungsional	15.000.000	-	-
		15 Penilaian Hasil Pengembangan Profesi Pejabat Fungsional	90.000.000	-	-
		16 Penilaian angka Kredit Pejabat Fungsional	20.000.000	-	-
		17 Pemantauan Kinerja Pejabat Fungsional	25.000.000	-	-
		18 Penerbitan SK CPNS, SK PNS, Pangkat, PMK, Gaji berkala dan Cuti PNS Struktural	174.575.000	-	-

1	2	3	4	5	6
		19 Pengurusan Taspen, Karpeg, Karis, Karsu, dan Pensiun PNS Struktural	87.888.500	-	-
		20 Mutasi PNS Struktural	86.029.000	-	-
		21 Pembuatan PNS dalam angka, Buku DUK, Map File, Buku Peta Jabatan	50.000.000	-	-
		22 Penyusunan Pelaporan dan Pendataan Tenaga Honorer	60.000.000		
		23 Pemberian Penghargaan bagi PNS Purna Tugas	208.750.000	-	-
		24 Pengurusan Satya Lancana karya Satya	26.731.000		
5	Urusan Kearsipan	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
		1 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	75.000.000		
		2 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	38.708.000		
		3 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasan	233.419.664		
		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	100.000.000		
		2 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	100.000.000		
		3 Pengadaan/Pembangunan Taman	15.000.000		
		4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor	25.000.000		
		5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional	33.380.000		
		6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	12.500.000		
		7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	15.000.000		
		8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	20.000.000		
		<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	18.400.000		
		2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri / Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	9.920.000		
		3 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	40.000.000		
		4 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja	20.000.000		
		<b>4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
		1 Pelaksanaan Kunjungan Kerja	99.750.000		
		<b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
		1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.000.000		
		2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000		
		3 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	11.000.000		
		4 Penyusunan Evaluasi Program Kerja	7.500.000		
		<b>6 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>			
		1 Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	10.000.000		
		2 Penyusunan Profil SKPD(Penyusunan Kantor Diklat Dalam Angka)	15.000.000		
		3 Penyusunan Program Kerja	7.500.000		
		<b>7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			
		1 Morning on Panglima Sudirman Street (MPS2)	30.000.000		

1	2	3	4	5	6
6	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	<p><b>8 Program Peningkatan, Penjejan, dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b></p> <p>1 Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi PNS Daerah (Diklat Prajabatan/LPJ Golongan I, II, III) 358.510.000</p> <p>2 Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah 45.000.000</p> <p>3 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (DiklatPim II) 46.820.000</p> <p>4 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (DiklatPim IV) 796.485.000</p> <p>5 Rapat-Rapat Koordinasi Kediklatan Kediklatan dalam dan Luar Daerah 6.000.000</p> <p>6 Diklat Kepemimpinan untuk Pelayanan Prima 140.000.000</p> <p>7 Diklat Peningkatan Kapasitas bagi Perangkat Kelurahan 140.000.000</p> <p>8 Diklat Penyuluh Kesehatan 140.000.000</p> <p>9 Pengelolaan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) 100.000.000</p> <p><b>9 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b></p> <p>1 Operasional Jaringan LAN dan Website 20.000.000</p> <p><b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <p>1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.580.000</p> <p>2 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 88.000.000</p> <p>3 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor 140.360.000</p> <p>4 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan 321.288.000</p> <p><b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <p>1 Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Pendukung Bangunan Gedung Kantor 25.000.000</p> <p>2 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 20.000.000</p> <p>3 Pengadaan Meubelair 50.000.000</p> <p>4 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll 45.000.000</p> <p>5 Pengadaan Taman 15.000.000</p> <p>6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor 50.000.000</p> <p>7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000</p> <p>8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 15.000.000</p> <p>9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer 45.000.000</p> <p>10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 15.000.000</p> <p><b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b></p> <p>1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 60.000.000</p> <p><b>4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b></p> <p>1 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 50.000.000</p> <p>2 Pelaksanaan Studi Banding/Kunjungan Kerja/dll 100.000.000</p> <p><b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b></p> <p>1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000</p> <p>2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 7.000.000</p>			

1	2	3	4	5	6
		3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.000.000		
		4 Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	6.000.000		
		5 Penyusunan DPA SKPD	5.000.000		
		<b>6 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>			
		1 Pembinaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	15.000.000		
		2 Pengembangan Budaya Kerja	10.000.000		
		3 Pembuatan Profil SKPD	5.000.000		
		<b>7 Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>			
		1 Kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	200.000.000		
		2 Kegiatan pelatihan tenaga pengelola SIAK	150.000.000		
		3 Kegiatan Implementasi SAK (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	400.000.000		
		4 Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	100.000.000		
		5 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan	600.000.000		
		6 Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan	125.000.000		
		7 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	250.000.000		
		8 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	175.000.000		
		9 Pembinaan Pelayanan Catatan Sipil	160.000.000		
		10 Surveillance Audit Sertifikasi SMM ISO 9001-2008	30.000.000		
		11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	13.000.000		
		12 Penyuluhan Catatan Sipil	85.000.000		
		13 Pemeliharaan Register Akta Capil	79.000.000		
		14 Pengelolaan Data Akta Catatan Sipil	16.000.000		
		<b>8 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			
		1 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	80.000.000		
		2 Morning On Panglima Sudirman Street (MPS2)	40.000.000		
		3 Seminggu di Kota Probolinggo ( Semipro )	25.000.000		

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**(KAIDAH PELAKSANAAN)**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012, Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Instansi wajib menerapkan prinsip – prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan atau Musrenbang, seperti musrenbang kelurahan, kecamatan dan musrenbang tingkat kota. RKPD tahun 2012 merupakan acuan bagi badan, dinas, kantor, bagian dan instansi maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Badan, dinas, kantor, bagian dan instansi maupun masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2012 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2012 menjadi acuan dan pedoman bagi badan, dinas, kantor, bagian/instansi dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing instansi, setelah menerima pagu sementara tahun 2012, perlu menyesuaikan Rencana Kerja menjadi Rencana Kerja dan Anggaran sebagai berikut :
  - a. Uraian penggunaan APBD Tahun 2012, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun 2012, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Uraian sebagaimana butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan penggunaan anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah.
3. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

4. Pada akhir tahun 2012, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD , serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap instansi wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Probolinggo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI